



LAPORAN ASESMEN

Analisa Situasi Pendidikan Anak Usia Dini di Sumba Timur

Basyrah Alwi
Aisyah Yuhanida Noor
Ari Zulkarnaen
Salfia Rahmawati

William & Lily Foundation
June 2019



William & Lily
FOUNDATION

LAPORAN ASESMEN

Analisa Situasi Pendidikan Anak Usia Dini di Sumba Timur

Basyrah Alwi
Aisyah Yuhanida Noor
Ari Zulkarnaen
Salfia Rahmawati

William & Lily Foundation
May 2019

ABBREVIATIONS

Abbreviations	English	Indonesian
ACDP	<i>Analytical and Capacity Development Partnership</i>	
APBDes	<i>Local government budget: drafted by local governments and adopted by a “perda” following debate and agreement within DPRDs</i>	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
APE	<i>Educational Games Tool</i>	Alat Permainan Edukatif
APK	<i>Gross Enrollment Rate</i>	Angka Partisipasi Kasar
BAPPEDA	<i>Local Development Planning Agency: local (regional) offices of Bappenas</i>	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BAPPELITBANGDA	<i>Regional body for planning, research and development</i>	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
BAPPENAS	<i>National Development Planning Agency</i>	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BINTEK	<i>Technical Assistance</i>	Bimbingan Teknis
BKB	<i>Parenting group formed by</i>	Bina Keluarga Balita
BKKBN	<i>National Population and Family Planning Board</i>	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
BOP	<i>School Operational Assistance</i>	Bantuan Operasional Penyelenggaraan
BPS	<i>National Statistical Bureau</i>	Badan Pusat Statistik
BRI		Bank Rakyat Indonesia
DAK-BOP	<i>Special Allocation Fund, part of the “dana perimbangan” regional fiscal balance transfers system</i>	Dana Alokasi Khusus-Bantuan Operasional Penyelenggaraan
DAPODIK		Data Pokok Pendidikan
DAU	<i>General Allocation Fund: a key element of the “dana perimbangan” system for transfer of Central general budget support to regions</i>	Dana Alokasi Umum
DD	<i>Village Allocated Fund</i>	Dana Desa
DFAT	<i>Department of Foreign Affairs and Trade (Government of Australia)</i>	
DIKMAS		Pendidikan Masyarakat
DINKES	<i>Department of Health</i>	Dinas Kesehatan
DISDIK	<i>Department of Education</i>	Dinas Pendidikan
DISDUKCAPIL	<i>Department of Population and Civil Registry</i>	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Abbreviations	English	Indonesian
DIRJEN		Direktorat Jenderal
DP3AP2KB		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
DPMD		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
DP2KB	<i>Regional office of population and family planning control</i>	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
DP3A		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
DPMD	<i>Regional office of village and community empowerment</i>	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
EU	<i>European Union</i>	Uni Eropa
ECCD	<i>Early Childhood Care and Development</i>	Pengembangan Anak Usia Dini
FGD	<i>Focus Group Discussion</i>	Diskusi Grup Terfokus
HIMAPAUDI		Himpunan Pendidik dan Tenaga Pendidik Anak Usia Dini Indonesia
IGTKI		Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia
KADES	<i>Head of Village</i>	Kepala desa
KII	<i>Key Informant Interview</i>	Wawancara Informan Kunci
NPSN		Nomor Pokok Sekolah Nasional
NTT	<i>East Nusa Tenggara</i>	Nusa Tenggara Timur
OPD		Organisasi Pemerintah Daerah
PAUD	<i>Early Childhood Education and Development</i>	Pengembangan Anak Usia Dini
PAUD HI	<i>Early Childhood Education and Development Holistic Integratif</i>	Pengembangan Anak Usia Dini terintegrasi secara holistik (<i>Holistic Integratif</i>)
PEMKAB	<i>Regency Level of Government</i>	Pemerintah Kabupaten
PERDA		Peraturan Daerah
PHBS		Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
PMT		Pemberian Makanan Tambahan
Posyandu		Pos Pelayanan Terpadu
KEMENDIKBUD	<i>Ministry of Education and Culture</i>	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Abbreviations	English	Indonesian
RISKESDAS	<i>National Basic Health Survey</i>	Riset Kesehatan Dasar Nasional
SUSENAS	<i>National Household Survey</i>	Survei Sosial Ekonomi Nasional
WLF	<i>William and Lily Foundation</i>	Yayasan William dan Lily

Table of Contents

ABBREVIATIONS	iii
Daftar Gambar.....	viii
RINGKASAN EKSEKUTIF	ix
1. Latar Belakang.....	1
1.1. Pendahuluan	1
1.2. Tujuan Kajian.....	4
2. Metodologi.....	5
3. Temuan dan Diskusi	8
3.1. Kebijakan terkait Program Anak Usia Dini di Sumba Timur.....	8
3.2. Pengelolaan Internal PAUD.....	9
3.2.1. Inisiatif dan Proses Pendirian PAUD	9
3.2.2. Operasional PAUD	10
3.2.3. Kurikulum.....	12
3.2.4. Sarana Pendukung	13
3.3. Tenaga Pendidik	15
3.4. Peserta Didik.....	17
3.4.1. Perkembangan Anak.....	17
3.4.2. Anak Berkebutuhan Khusus (ABK).....	19
3.5. Orang Tua dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).....	19
3.5.1. Orang Tua dan Perkembangan Anak	19
3.5.2. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Keluarga	22
3.6. Koordinasi lintas sektoral dan lembaga penyelenggara PAUD	23
3.6.1. Pemerintah Kabupaten.....	23
3.6.2. Pemerintah Desa	25
3.6.3. Puskesmas.....	27
3.6.4. Posyandu	29
3.6.5. Bina Keluarga Balita	30
3.6.6. Organisasi Mitra Pembangunan Pemerintah Daerah.....	31
3.6.7. PAUD Holistik Integratif (HI).....	32
4. Kesimpulan	34

Daftar Pustaka	35
Lampiran	36
Peraturan Pemerintah tentang PAUD	36

Daftar Gambar

Gambar 1: Tahapan perkembangan program PAUD di Indonesia (Hasan dkk, 2013)	3
Gambar 2: APE dalam dan luar gedung yang dimiliki PAUD. Guru juga membuat APE dari pemanfaatan bahan lokal.....	15
Gambar 3: Alur penetapan APBDes	27

Daftar Grafik

Grafik 1: Sebaran Dana Desa untuk Pelayanan Kesehatan	26
Grafik 2: Grafik Sebaran Dana Desa untuk PAUD.....	26
Grafik 3: Ragaman Bentuk Integrasi Layanan Anak Usia Dini di Desa.....	32

Daftar Tabel

Table 1: Daftar Sampel PAUD di Sumba Timur	5
Table 2: Daftar Sampel KII (Key Informant Interview)	5
Table 3: Karakteristik Responden Survei (N=34)	6
Table 4: Sebaran Posyandu di setiap Kecamatan di Kabupaten Sumba Timur tahun 2019	29
Table 5: Sebaran Posyandu dengan strata 'mandiri' tahun 2019.....	30
Table 6: Sebaran BKB HI di Kabupaten Sumba Timur	31

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan ini memaparkan hasil studi penilaian program PAUD (Pengembangan Anak Usia Dini) di Kabupaten Sumba Timur yang dilakukan pada bulan Maret sampai Mei 2019 di delapan layanan PAUD yang tersebar di empat kecamatan dalam rangka memetakan kebijakan pendukung program PAUD di Kabupaten Sumba Timur, tata kelola program, dan juga pengelolaan di tingkat layanan PAUD. Studi dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam kepada pengelola PAUD, staf Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) serta mitra pembangunan pemerintah daerah, observasi terlibat dan semi-eksperimen di tingkat layanan, dan juga kaji ulang dokumen-dokumen terkait PAUD. Survei kecil terhadap 34 orang ibu juga dilakukan untuk menambah informasi terkait pengetahuan dan praktek kesehatan dan kebersihan keluarga. Konfirmasi temuan kepada informan di tahap pengolahan data juga dilakukan dalam rangka triangulasi dan menambah kualitas informasi dan data studi.

Studi ini menemukan bahwa kebijakan-kebijakan yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumba Timur terkait anak usia dini masih berupa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri atau setingkatnya. Meski demikian, setidaknya ada juga tiga kebijakan turunan tentang anak usia dini yang telah dikeluarkan khusus oleh Pemkab Sumba Timur termasuk didalamnya Peraturan Daerah (Perda) tentang Perlindungan Anak di tahun 2014, Perda ‘Revolusi Kesehatan Ibu dan Anak’ di tahun 2011, dan Perda ‘Percepatan Penanganan *Stunting*’ di tahun 2019.

Proses pendirian layanan PAUD umumnya diinisiasi oleh lembaga keagamaan seperti gereja, dukungan organisasi non-pemerintah, dan masyarakat bersama dengan pemerintah desa. Pengelolaan PAUD masih mengandalkan iuran-iuran rutin yang dikumpulkan dari peserta didik berupa uang pendaftaran dan iuran bulanan. Beberapa layanan PAUD yang telah mempunyai izin operasional dan telah terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dengan dikeluarkannya Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) juga telah menerima bantuan berupa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus-Bantuan Operasional Penyelenggaraan (DAK-BOP) PAUD, dan juga alokasi dari dana desa. Pemanfaatan dana-dana ini umumnya digunakan untuk pembelian perlengkapan dan peralatan cepat habis seperti alat tulis, kertas, dan lainnya termasuk didalamnya pembelian Alat Peraga Edukatif (APE), program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk peserta didik, dan juga insentif atau honor bagi pengelola dan guru.

Guru umumnya direkrut oleh pengelola dan kepala PAUD berdasarkan sifat kasih kepada anak dan mau melayani dikarenakan imbalan jasa yang diterima akan sangat minimal. Insentif guru berkisar antara Rp 75.000,- s/d Rp 750.000,- tergantung dari kualifikasi guru dan ketersediaan dana yang dikumpulkan oleh PAUD dan nilai ini sangat jauh dari upah minimum regional yang telah ditetapkan untuk wilayah Nusa Tenggara Timur. Mayoritas guru PAUD di Sumba Timur masih berkualifikasi Sekolah Menengah Atas (SMA) dan telah mendapat pelatihan PAUD setidaknya satu kali. Pelatihan biasanya diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur bersama dengan lembaga-lembaga mitra pemerintah daerah dengan dukungan dari pengurus Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia (IGTKI) cabang Sumba Timur, sementara Himpunan Pendidik dan

Tenaga Pendidik Anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi) masih belum terbentuk hingga saat ini. Pelatihan-pelatihan yang diterima umumnya berupa materi pembelajaran dan pengelolaan kelas dan yang terbaru adalah materi tentang kurikulum PAUD 2013.

Sebagian besar PAUD sudah mulai mengadopsi dan menerapkan kurikulum PAUD 2013, namun penerapan kurikulum masih terbatas dalam tataran administratif dan belum banyak berfokus kepada anak. Dari amatan di kelas, masih banyak guru yang menerapkan pendekatan skolastik pada peserta didik, ditambah lagi guru juga membebani peserta didik dengan pekerjaan rumah yang bertolak belakang dengan kebijakan-kebijakan yang ada tentang pengelolaan PAUD. Pada akhirnya beberapa aspek perkembangan peserta didik seperti motorik dan sensorik kurang berkembang dibandingkan dengan aspek kognitifnya. Hal ini nampaknya berbanding lurus dengan motivasi dan harapan orang tua saat mendaftarkan anak-anak mereka ke PAUD agar anak-anak mereka mampu untuk menulis, berhitung dan membaca, yang kemudian menjadi tuntutan kepada layanan PAUD untuk menanggapi harapan tersebut dengan pendekatan skolastik.

Peran orang tua bagi pengelola dan guru PAUD minimal berusaha untuk membawa dan mendaftarkan anak-anaknya ke layanan PAUD. Hampir semua anak dengan usia 4-6 tahun di lingkungan PAUD studi sudah terdaftar di layanan PAUD, walaupun tingkat kehadiran mereka masih sangat fluktuatif, apalagi bagi layanan PAUD di lokasi dengan topografi dan medan yang sulit. Peran lain orang tua adalah mengantar jemput anak, membayarkan iuran bulanan, dan juga berpartisipasi dalam pembangunan atau perawatan gedung layanan PAUD untuk kenyamanan dan keamanan anak-anak mereka. Orang tua, pengelola dan guru PAUD juga mempunyai mekanisme pertemuan bersama, setidaknya dua kali dalam satu tahun pada saat pembagian rapor peserta didik. Dalam pertemuan ini, selain membahas kemajuan aspek perkembangan anak, biasanya mereka juga membahas tentang pengasuhan di rumah. Beberapa layanan PAUD juga sudah mengembangkan materi pengasuhan dan pendidikan keorangtuaan, baik yang bersifat informal seperti Kelompok Bermain Keluarga yang dikembangkan oleh lembaga ChildFund International atau melalui program formal seperti Bina Keluarga Balita (BKB) dari BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) yang diadakan satu kali setiap bulannya bersamaan dengan hari Posyandu.

Studi juga menemukan masih banyak aktor dan pemangku kepentingan anak usia dini yang belum pernah mendengar terminologi PAUD Holistik Integratif (HI). Meskipun demikian, beberapa layanan PAUD di tingkat desa sudah menuju ke arah keterpaduan antar program, meski belum menyeluruh. Keterpaduan layanan-layanan pendidikan, psiko-sosial, gizi, dan kesehatan adalah bentuk yang paling umum ditemui dimana PAUD telah bekerjasama dengan Posyandu dan Puskesmas terdekat dalam pemantauan tumbuh kembang dan kesehatan peserta didik, disamping program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) secara rutin. PAUD yang telah bersinergi dengan tiga layanan tersebut, ditambah layanan pengasuhan dan pendidikan keorang-tuaan biasanya adalah PAUD yang dikelola oleh lembaga mitra pembangunan pemerintah daerah atau menjadi percontohan BKB-HI.

Kata Kunci: *Kajian Pemetaan Kebutuhan, Pendidikan Anak Usia Dini, Sumba Barat Daya*

1. Latar Belakang

1.1. Pendahuluan

Program Pengembangan Anak Usia Dini (PAUD) sangat penting untuk memastikan anak-anak berkembang secara optimal di segala aspek kehidupan mereka kelak. Studi membuktikan bahwa, lebih dari 90% perkembangan otak manusia terjadi pada lima tahun awal kehidupan seorang anak (Chugani, 1994; Nelson 2000). Oleh karenanya, intervensi pada perkembangan anak-anak sedini mungkin, dapat membantu mereka dalam membangun semangat belajar, mengembangkan kemampuan-kemampuan sosial, motorik dan sensorik, menguatkan kemampuan berbahasa, mendorong anak untuk lebih kreatif dan inovatif, juga mempersiapkan mereka untuk menyelesaikan dan mengatasi hambatan.

Banyak studi juga telah membuktikan bahwa manfaat dari PAUD terhadap anak akan berdampak sepanjang hidup mereka. Satu studi dari Bank Dunia (*World Bank*) di Indonesia menyatakan bahwa intervensi yang berfokus di PAUD berpotensi memberikan investasi pada peningkatan sumber daya manusia yang lebih baik bagi sebuah negara di masa depan (World Bank, 2005; Hasan, 2013). Studi-studi terbaru tentang otak manusia juga memberikan simpulan bahwa intervensi pada anak usia dini yang holistik memberikan dampak yang signifikan pada perkembangan fisik dan kesejahteraan anak. Pada prosesnya, peserta didik PAUD akan menjadi anggota masyarakat yang lebih produktif di masa depan, dan membantu membentuk bangsa yang lebih kuat.

Jadi, intervensi pada anak usia dini dalam aspek-aspek perkembangan sosial, kognitif, dan fisiologis dan juga sekaligus intervensi pada orang tuanya diakui sebagai investasi yang cost-effective untuk membangun sumber daya manusia, mengurangi ketimpangan, dan mendukung pembangunan serta kesejahteraan bangsa dan negara Indonesia di masa yang akan datang.

PAUD di Indonesia: Perkembangan dan Kebijakan

Sebelum tahun 2007, terminologi PAUD belum dikenal secara luas di Indonesia. Istilah PAUD¹ menjadi populer dalam belasan tahun terakhir ketika Departemen Pendidikan Nasional/Depdiknas (sekarang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan/Kemendikbud) saat itu bersama dengan lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk urusan anak-anak (UNICEF *The United Nations Children's Fund*) mencanangkan gerakan ini sebagai bagian penting untuk anak-anak dan bangsa Indonesia. Setahun sebelumnya, di tahun 2006, Bank Dunia (World Bank/WB) bersama Pemerintah Kerajaan Belanda juga memulai proyek lima tahun dalam membantu Pemerintah Republik Indonesia dalam mengembangkan program PAUD.

Dalam prosesnya, setidaknya ada lima tahapan krusial perkembangan program PAUD di Indonesia. Pada tahun 2000an awal, program Taman Posyandu diinisiasi di Tanjung Sari, satu kecamatan kecil di wilayah Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Proyek ini diimplementasikan sebagai percontohan untuk memadukan program layanan anak usia dini yang ada di tingkat desa dan sekaligus sebuah upaya menghidupkan kembali program Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu). Tahun 2001, Depdiknas saat itu juga membentuk Direktorat PAUD untuk mendukung Pemerintah Republik Indonesia dalam

¹ Dalam konteks awal disebut sebagai 'Pendidikan' Anak Usia Dini

akselerasi program PAUD. Hasilnya, di tahun 2003, PAUD dimasukkan sebagai bagian dari **Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) No. 20 tahun 2003** sebagai dokumen kebijakan kunci.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) juga mengeluarkan sebuah kebijakan untuk mendukung kemajuan program PAUD di Indonesia melalui ‘Strategi PAUD Nasional’ di tahun 2008², yang kemudian menjadi pijakan kunci untuk program layanan PAUD yang holistik dan integratif di Indonesia. Strategi-strategi ini termasuk didalamnya a) peningkatan aksesibilitas dan b) cakupan layanan PAUD yang menyeluruh, yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan PAUD Holistik-Integratif (HI) dari berbagai sektor. Selain Bappenas, sektor lain yang bertanggung jawab dalam strategi ini dan juga telah mengembangkan program PAUD sejenis mencakup Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas), Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Secara berurutan, setiap kementerian dan lembaga telah mengembangkan Taman Kanak-kanak/Pendidikan Anak Usia Dini (TK/PAUD), Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal/Tuhfatul Athfal (RA)/Sekolah Minggu, Taman Anak Sejahtera (TAS), Taman Posyandu (TP), and Bina Keluarga Balita (BKB)³.

Di tahun 2013, sebagai respon dari dokumen Strategi PAUD Nasional dan serangkaian studi PAUD, Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 6 tahun 2013 sebagai sebuah kebijakan ‘Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif’ (PAUD-HI) dan menunjuk Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Kemendiknas) saat itu (kini Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan/Kemendiknas) sebagai koordinator gugus tugas. Di periode selanjutnya, Kemendiknas memasukkan PAUD-HI dalam kurikulum pendidikan 2013 sebagai kurikulum standar nasional.

PAUD di Kabupaten Sumba Timur

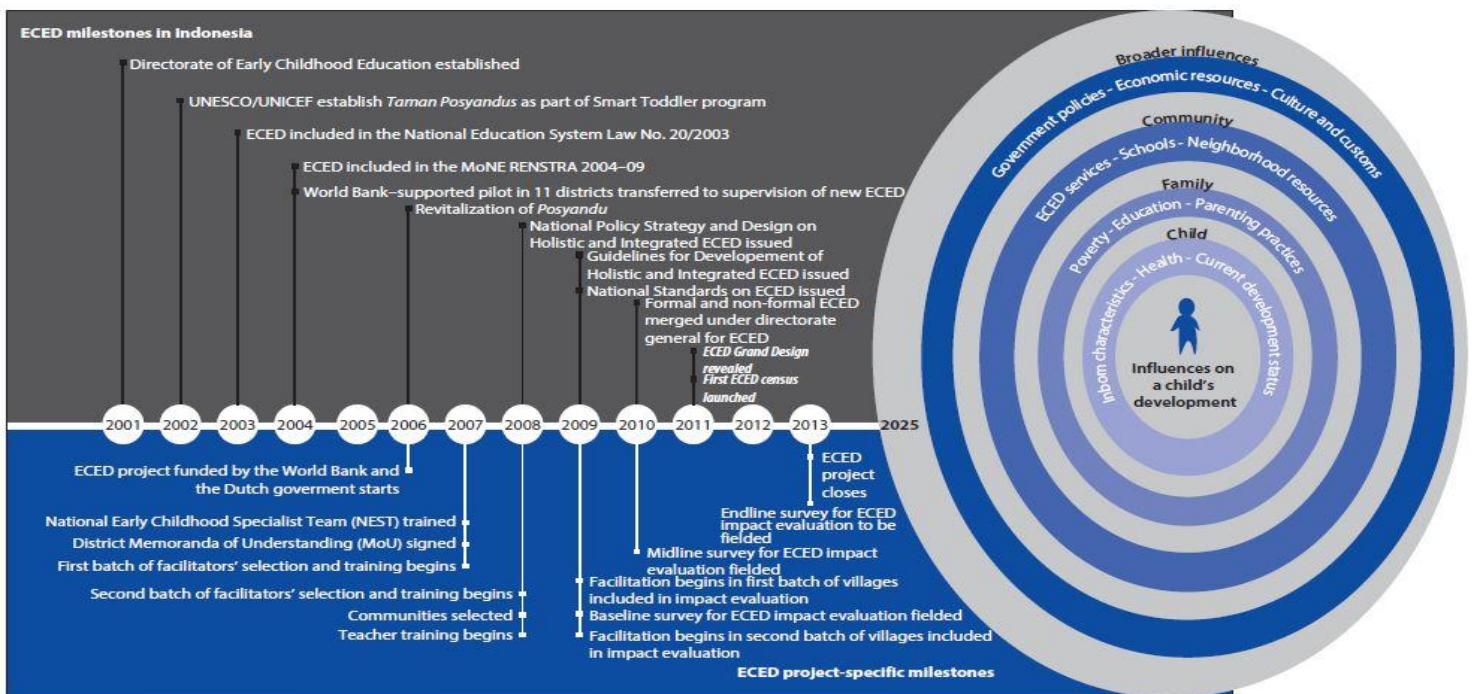
Kabupaten Sumba Timur berada di pulau Sumba, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Pulau Sumba saat ini terbagi menjadi empat kabupaten, dari Timur ke Barat termasuk di dalamnya Kabupaten Sumba Timur dengan wilayah terluas, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat, dan Kabupaten Sumba Barat Daya. Sebelum tahun 2007, Pulau Sumba hanya terbagi menjadi dua kabupaten, Kabupaten Sumba Timur and Sumba Barat. Kabupaten Sumba Tengah dan Kabupaten Sumba Barat Daya dibentuk melalui **Undang-undang No. 3 dan No. 6 tahun 2007** berturut-turut.

² Di tahap ini huruf ‘P’ dalam PAUD berarti Pengembangan

³ Raudhatul Athfal salah satu bentuk satuan PAUD yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak 4 sampai 6 tahun ; Taman Anak Sejahtera adalah salah satu bentuk pelayanan sosial yang memberikan perawatan, pengasuhan dan perlindungan bagi anak usia 3 bulan sampai usia 8 tahun; Taman Posyandu atau Pos PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut; Bina Keluarga Balita adalah upaya peningkatan pengetahuan, keterampilan dan kesadaran ibu serta anggota keluarga lain dalam membina tumbuh kembang balitanya melalui rangsangan fisik, motorik, kecerdasan, sosial, emosional serta moral yang berlangsung dalam proses interaksi antara ibu/anggota keluarga lain nya dengan anak balita

Perkembangan program PAUD di Kabupaten Sumba Timur juga cukup pesat. Saat ini, setidaknya ada 49 unit TK dan 222 Kelompok Bermain (Kober) yang terdaftar di Dinas Pendidikan (Disdik) dan tersebar di 140 desa dan 16 kelurahan (lihat Lampiran 1). Meski begitu, hasil penelitian dari *Analytical and Capacity Development Partnership* (ACDP) untuk sektor pendidikan, di tahun 2016 menyatakan bahwa sekitar 30% peserta didik kelas 2 Sekolah Dasar (SD) di sederatan pulau Sumba masih mengalami kesulitan membaca, dan menjadi salah satu indikator masih rendahnya tingkat literasi peserta didik di kelas rendah⁴. Peserta didik juga masih banyak yang belum dapat menggunakan Bahasa Indonesia secara lancar, karena bahasa yang digunakan oleh guru di dalam kelas masih banyak menggunakan bahasa ibu atau bahasa daerah dan berkorelasi dengan tidak optimalnya penyerapan pembelajaran oleh peserta didik. Dalam studi yang sama juga ditemukan bahwa peserta didik kelas 2 yang tinggal kelas di SD-SD lokasi studi sebanyak 12% sampai 21%. Fakta ini merupakan indikator bahwa anak belum dipersiapkan secara matang untuk memasuki lingkungan sekolah dan mengikuti pembelajaran di sekolah.

Gambar 1: Tahapan perkembangan program PAUD di Indonesia (Hasan dkk, 2013)



Selain ACPD yang didanai oleh Departemen Perdagangan dan Luar Negeri (DFAT *Department of Foreign Trade and Affairs*) Pemerintah Australia, beberapa lembaga dan organisasi non-pemerintah juga telah bekerja bersama Pemkab Sumba Timur untuk menanggulangi masalah-masalah terkait PAUD dan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) seperti UNICEF, World Food Programme (WFP), Wahana Visi Indonesia (WVI), Yayasan Charis Indonesia (Charis National Academy), Yayasan Adjarmanu, ChildFund International Indonesia (ChildFund), dan Sumba Integrated Development (SID). Dua lembaga yang disebutkan terakhir, saat ini juga sedang berkolaborasi dalam peningkatan mutu PAUD

⁴Kelas 1 sampai kelas 3 SD

dalam program lima tahun (2018-2021) yang didanai oleh Uni Eropa (EU) dan menyangkut 26 layanan PAUD di Kabupaten Sumba Timur. Ini merupakan suatu berita baik sebagai langkah awal untuk mendukung Pemkab Sumba Timur dan pemangku kepentingan lainnya untuk bersama-sama mengembangkan dan mempercepat perbaikan mutu program PAUD di Kabupaten Sumba Timur.

Berdasarkan realitas-realitas di atas, Yayasan William dan Lily (WLF) berencana untuk dapat berkontribusi dalam percepatan kualitas pendidikan, khususnya pada PAUD, di Kabupaten Sumba Timur. WLF yakin bahwa PAUD merupakan elemen penting yang memungkinkan generasi muda dalam komuniti-komuniti tertinggal untuk tumbuh dan berkembang menjadi individu-individu yang mandiri dan berkualitas.

1.2. Tujuan Kajian

Studi ini bertujuan untuk melihat dan mengidentifikasi:

1. Situasi program PAUD di Kabupaten Sumba Timur,
2. Kebijakan pemerintah baik tingkat nasional maupun sub-nasional terhadap program anak usia dini,
3. Kurikulum yang digunakan dan bagaimana PAUD-PAUD dikelola selama ini,
4. Hubungan PAUD dengan sektor-sektor lain,
5. Metode pengajaran yang digunakan oleh pengelola dan guru, serta
6. Kapasitas dan hubungan antara guru dan peserta didik.

2. Metodologi

Kajian ini menggunakan teknik *purposive* sampling untuk pengumpulan data dan sampelnya. Delapan PAUD dipilih dan mewakili karakteristik ekologi desa-kota. Akses dan kedekatan terhadap pusat pemerintahan diasumsikan dapat menjadi salah satu faktor pendorong perkembangan pengelolaan layanan PAUD. Layanan PAUD yang berlokasi dekat dengan pusat kota memungkinkan untuk lebih mudah mendapat informasi lebih cepat dan lebih banyak dibandingkan dengan layanan PAUD yang lebih jauh. Dengan melihat karakteristik ekologi ini, ragam pendirian, pendampingan, dan kemajuan layanan PAUD dapat lebih terlihat. Kecamatan Kota Waingapu dan Kanatang dipilih sebagai wilayah kota-semi kota, sedangkan Kecamatan Haharu dan Pandawai walaupun jaraknya tidak terlalu jauh dari Kota Waingapu dapat mewakili karakteristik desa⁵.

Table 1: Daftar Sampel PAUD di Sumba Timur

No	Nama PAUD	Kecamatan
1	PAUD Mentari Kasih, Desa Rambangaru	Haharu
2	PAUD Luku Pala, Desa Praibakul	
3	PAUD Ebenhazer, Desa Kadumbul	Pandawai
4	PAUD Koloweni, Desa Palakahembi	
5	PAUD Lentera Sumba, Desa Kuta	Kanatang
6	PAUD Metanoia, Kelurahan Temu	
7	PAUD Pelangi Kasih, Kelurahan Kambajawa	Waingapu
8	TK Praioda, Desa Mbatakpidu	

Informasi dan data primer studi dikumpulkan menggunakan teknik-teknik kualitatif selama delapan hari di bulan Maret 2019. Wawancara mendalam dilakukan kepada individu-individu yang relevan dengan program PAUD di Kabupaten Sumba Timur. Di tingkat kabupaten, selain mewawancarai perwakilan Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia (IGTKI) cabang Sumba Timur dan

beberapa staf Organisasi Perangkat Daerah (OPD), team juga mewawancarai beberapa LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang bekerja di Sumba Timur. Di tingkat kecamatan, tenaga kesehatan seperti ahli gizi dan bidan di empat Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)⁶ juga diwawancarai untuk mengetahui permasalahan, tantangan dan koordinasi terkait program pengembangan anak usia dini di desa-desa dampingan. Di tingkat desa, selain mewawancarai kepala-kepala desa, tim juga mewawancarai pengelola, guru PAUD termasuk juga para orang tua peserta didik.

Table 2: Daftar Sampel KH (Key Informant Interview)

Sumber	Tingkat	N
Staf Bappeda	Kabupaten	1
Staf Dinkes	Kabupaten	2
Staf Disdik	Kabupaten	1

Wawancara umumnya dilakukan di rumah, ruangan gedung PAUD, dan ruangan kantor dimana informan bekerja dengan durasi tidak lebih dari satu jam setengah dengan

⁵ Jarak ke Kota Waingapu dari ke ibu kota Kecamatan Kanatang (Kelurahan Temu), Kecamatan Pandawai (Desa Kawangu), dan Kecamatan Haharu (Desa Rambangaru) berturut-turut adalah 5 km, 11 km, dan 47 km. Satu lokasi layanan PAUD di Desa Mbatakpidu, walaupun termasuk dalam wilayah administratif Kecamatan Kota Waingapu, namun jaraknya ke ibu kota kabupaten mencapai 16 km. sumber: BPS Sumba Timur (2018)

⁶ 1) Puskesmas Rambangaru, Haharu; 2) Puskesmas Kawangu, Pandawai; 3) Puskesmas Kanatang, Kanatang; dan 4) Puskesmas Waingapu, Kota Waingapu

Sumber	Tingkat	N
Staf DPMD	Kabupaten	2
Staf DP3AP2KB	Kabupaten	2
Mitra pembangunan daerah	Kabupaten	2
Ketua IGTKI cabang Sumba Timur	Kabupaten	1
Staf Puskesmas	Kecamatan	4
Kepala Desa/Lurah	Desa/Kelurahan	8
Pengelola/Kepala PAUD	PAUD	8
Orang tua peserta didik	PAUD	8
Jumlah		52

menggunakan panduan semi-terstruktur. Informasi yang diberikan oleh informan juga direkam menggunakan perekam digital atas persetujuan informan yang dibacakan sebelum wawancara dimulai.

Observasi terlibat dan semi-eksperimen juga dilakukan di tingkat layanan PAUD untuk mengetahui aspek-aspek perkembangan peserta didik dan pengelolaan kelas.

Amatan terhadap jalannya pembelajaran di dalam dan luar kelas memungkinkan tim mengetahui hubungan antara guru dan peserta didik termasuk kapasitas guru dalam mengelola kelas. Aspek perkembangan peserta didik, di lain sisi, dinilai melalui metode semi-eksperimen seperti bermain tebak warna, menggambar, melempar-menangkap bola, dan berdiri dengan satu kaki yang difasilitasi oleh satu orang psikolog pendidikan.

Tim juga melakukan tinjauan pada dokumen-dokumen terkait PAUD untuk menambah khasanah informasi program PAUD di Kabupaten Sumba Timur. Beberapa dokumen yang ditinjau berupa kebijakan-kebijakan terkait anak usia dini, data-data rutin yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS), monografi desa dan laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), data-data kesehatan seperti prevalensi dan insiden diare dan gizi anak usia dini, termasuk sebaran dan strata Posyandu di Sumba Timur.

Sebagai tambahan, survei kecil terhadap 34 orang tua (ibu) peserta didik juga dilakukan menggunakan kuesioner terstruktur sederhana. Tim mewawancarai orang tua peserta didik yang sedang ada di PAUD secara acak dengan memberikan pernyataan persetujuan untuk berpartisipasi dalam studi. Survei ini dilakukan untuk melihat perilaku dan praktek pemberian makan anak, gizi, kesehatan anak, dan kebersihan di rumah tangga. Tabel 3 di bawah menggambarkan karakteristik ibu yang menjadi responden survei.

Table 3: Karakteristik Responden Survei (N=34)

Variabel	Deskriptif
Kecamatan (domisili)	
Haharu	29,4% (10/34)
Pandawai	23,5% (8/34)
Kanatang	26,5% (9/34)
Kota Waingapu	20,6% (7/34)
Usia ibu (median)	35 tahun

Dalam rangka meningkatkan kualitas data, metode triangulasi melalui konfirmasi dan diskusi temuan studi juga dilakukan pada bulan Mei 2019 di Kota Waingapu. Beberapa informan studi dan pemangku kepentingan program PAUD di Sumba Timur diundang untuk menanggapi dan mendiskusikan temuan dalam tiga jam kegiatan dan menyepakati kebenaran informasi serta membentuk langkah awal

⁷ Sampel diambil menurut convenience sampling. Dalam beberapa literatur, jumlah sampel 30 merupakan jumlah terkecil yang dapat diambil dalam sebuah survei (Chakrapani, 2011)

Variabel	Deskriptif
Min.	21 tahun
Maks.	69 tahun
Usia anak (median)	63 bulan
Min.	47 bulan
Maks.	75 bulan
Jenis kelamin anak	
Laki-laki	44,1% (15/34)
Perempuan	55,9% (19/34)

forum PAUD HI di Sumba Timur.

Data-data dan informasi kualitatif primer disadur dalam catatan lapangan setiap anggota tim peneliti sesuai dengan panduan pertanyaan dan kemudian dipilah secara tematik melalui analisis konten. Sedangkan data survei dimasukkan dan dianalisis secara deskriptif melalui Microsoft Excel ©.

3. Temuan dan Diskusi

3.1. Kebijakan terkait Program Anak Usia Dini di Sumba Timur

Kebijakan dan sistem yang ajeg diakui sangat berkontribusi dalam mendukung keberlanjutan suatu program dalam jangka panjang. Meski demikian, dari hasil wawancara dan penelusuran informasi secara daring dan saluran lain, tidak banyak kebijakan strategis terkait program PAUD yang sudah dikeluarkan oleh Pemkab Sumba Timur. Kebanyakan kebijakan-kebijakan yang digunakan dan dijadikan acuan oleh Pemkab Sumba Timur selama ini masih merupakan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat, seperti Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri (Permen) dan setingkatnya.

Di tingkat nasional, **Perpres No. 60 tahun 2013 tentang PAUD Holistik Integratif (HI)** merupakan titik awal baru bagi program PAUD di Indonesia. Beberapa kabupaten/kota dengan asistensi dan advokasi mitra pemerintah daerah telah menerbitkan peraturan turunannya dan pembentukan gugus tugas PAUD HI di level kabupaten/kota, seperti Pemkab Bone dengan Peraturan Bupati (Perbup) Taman Paditungka dan Pemkab Sumba Barat dengan Pembentukan Tim Pengelola Taman Pawodda. Istilah ‘holistik’ dalam kebijakan ini mengacu pada pemenuhan layanan esensial anak usia dini dalam segala aspek kesehatan dan gizi, rangsangan pendidikan, pembinaan moral-emosional, pengasuhan, dan melindungi anak dari segala bentuk kekerasan dan perlakuan yang salah. Sedangkan ‘integratif’ dimaknai dalam terselenggaranya pelayanan anak usia dini yang terpadu dan selaras antar lembaga layanan terkait dan terwujudnya komitmen seluruh unsur di masyarakat. Dalam studi ini, istilah PAUD HI di Sumba Timur belum terlalu banyak terdengar. Sebagian besar informan studi, baik di tingkat PAUD, desa, sampai OPD kabupaten banyak yang belum mendengar dan mengetahui tentang PAUD HI.

PAUD juga merupakan satu dari beberapa arah kebijakan yang tertuang dalam **Rencana Aksi Nasional (RAN) ‘Perlindungan Anak’ 2015-2019** yang difokuskan pada peningkatan akses terhadap pelayanan yang berkualitas dalam rangka mendukung tumbuh kembang anak, peningkatan perlindungan anak dari tindakan kekerasan dan perlakuan salah lainnya, dan peningkatan efektifitas kelembagaan perlindungan anak. Pemerintah Republik Indonesia melalui **PP No.2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM)**, di bagian kedua tentang SPM Pendidikan dan bagian ketiga tentang SPM Kesehatan mengamanatkan Pemerintah Daerah (Pemda) bahwa layanan PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan kesetaraan menjadi tanggung jawab Pemda kabupaten/kota. Kebijakan ini juga diikuti dan dikuatkan dengan peraturan-peraturan setingkat menteri seperti **Permen Dalam Negeri (Permendagri) No. 22 tahun 2018** tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemda tahun 2019, **Permen Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 18 tahun 2018** tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Pasal 6 ayat 1) yang menyatakan Pemda kabupaten/kota dan Pemerintah Desa (Pemdes) atau kelurahan mengupayakan ketersediaan layanan PAUD paling sedikit satu unit di setiap desa/kelurahan.

Dalam penelusuran kebijakan di tingkat lokal, setidaknya ada tiga kebijakan khusus yang ditemukan dan telah diterbitkan oleh Pemkab Sumba Timur terkait anak usia dini. Kebijakan pertama adalah **Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sumba Timur No. 3 tahun 2011** tentang ‘Revolusi Kesehatan

Ibu dan Anak’ yang merupakan turunan dari **Peraturan Gubernur (Pergub) NTT No. 42 tahun 2009** dengan fokus yang sama yang berisi jaminan Pemkab Sumba Timur dalam pemberian layanan kesehatan kepada ibu dan anak mulai sejak kehamilan sampai satu hari menjelang ulang tahun anak ke -18⁸. Dalam kebijakan ini, selain kewajiban Pemda, diatur juga kewajiban pemberi layanan dan penerima layanan. Dalam bahasa sederhana dan singkat, ibu diwajibkan untuk mengakses layanan kesehatan sejak pemeriksaan antenatal pertama secara rutin minimal 4 kali kunjungan, pertolongan persalinan, pemeriksaan nifas, dan pelayanan neonatal bagi bayi yang keseluruhannya hanya boleh dilakukan oleh tenaga kesehatan di fasilitas layanan kesehatan. Dalam pasal 18 di dalam Perda ini, juga diatur tentang peran dan kewajiban Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) terkait seperti Dinkes, DPMD, DP3AP2KB, Disdukcapil, Puskesmas, Pemerintah kelurahan/desa, dokter dan tenaga kesehatan lain, dukun bersalin, dan juga masyarakat.

Dalam isu perlindungan anak, Pemkab Sumba Timur telah menerbitkan **Perda No. 4 tahun 2014 tentang ‘Perlindungan Anak’** yang advokasinya didukung oleh WVI sebagai mitra pemerintah daerah. Inti dari Perda ini mengamanatkan pada pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak, dan partisipasi anak dan masyarakat dalam perlindungan hak-hak tersebut. Isu-isu terkait Anak Usia Dini dalam Perda ini tertuang jelas di Bab VII tentang pelaksanaan, di bagian ketiga, pasal 25, pasal 26, dan pasal 27 yang intinya Pemda dan masyarakat berkewajiban memberikan perlindungan kepada anak usia dini dan menyelenggarakan PAUD terpadu. Perda ini juga diejawantahkan dalam pembentukan tim Lembaga Perlindungan Anak Daerah (LPAD) yang berisi individu, lembaga lintas sektor dan pihak masyarakat melalui **Surat Keputusan Bupati Sumba Timur No. 219/BPP & KB.463/1421/IV/2013**.

Kebijakan terbaru yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Timur adalah **Perbup Sumba Timur No. 1 tahun 2019⁹** tentang ‘Pencegahan dan Penanganan Stunting’ yang merupakan turunan dari **Perpres No. 42 tahun 2013** tentang ‘Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi’ dan **Perpres No. 83 tahun 2017** tentang ‘Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi’. Perbup ini bertujuan untuk meningkatkan status gizi masyarakat khususnya balita dan berfokus pada seribu hari pertama kehidupan anak.¹⁰

3.2. Pengelolaan Internal PAUD

3.2.1. Inisiatif dan Proses Pendirian PAUD

Dalam **Permendikbud No. 84 tahun 2014** tentang ‘Pendirian Satuan PAUD’ di pasal 2 dinyatakan bahwa satuan PAUD dapat didirikan oleh 1) pemerintah kabupaten/kota, 2) pemerintah desa, 3) orang perseorangan, 4) kelompok orang, atau 5) badan hukum lainnya. Sedangkan Permendikbud No. 18

⁸ Pasal 6 ayat 3: Setiap anak perlu mendapat pelayanan kesehatan yang memadai sejak 0 sampai dengan 1 hari menjelang ulang tahun yang ke 18

⁹ Kebijakan turunan dari Perbup ini adalah dikeluarkannya SK Bupati Sumba Timur No. 121/ DINKES.800/121/1/2019 tentang ‘Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Gizi Buruk dan Stunting Tingkat Kabupaten Sumba Timur’ yang terdiri dari individu-individu dan OPD lintas sektor termasuk Dinkes, Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Disdik, Dinsos, DPMD, dan Bappeda

¹⁰ Ringkasan lengkap peraturan pemerintah tingkat nasional hingga subnasional dapat dilihat dalam lampiran “[Peraturan Pemerintah tentang PAUD](#)”

tahun 2018 tentang ‘Penyediaan Layanan PAUD’ pasal 5 menyatakan bahwa layanan PAUD dapat disediakan oleh 1) pemerintah daerah kabupaten/kota, 2) pemerintah desa, dan 3) masyarakat. Lima dari delapan PAUD dalam studi ini didirikan dan dikembangkan atas inisiatif gereja (termasuk di dalamnya yayasan gereja, pendeta dan/atau jemaat-jemaatnya) seperti PAUD Mentari Kasih, PAUD Ebenhezer, PAUD Kolowini, PAUD Lentera Sumba, dan PAUD Pelangi Kasih. Sedang PAUD Metanoia didirikan atas kerjasama tiga pihak antara pengurus Gereja Bethel, Pemerintah Kelurahan Temu, dan Pemerintah Kecamatan Haharu. Dua lainnya berdiri melalui dukungan organisasi non-pemerintah, PAUD Luku Pala diinisiasi oleh WVI dan TK Praioda melalui Yayasan SID, walaupun operasional keduanya kemudian dialihkan kepada dan diteruskan oleh pemerintah desa masing-masing.

Pendirian dan inisiasi PAUD umumnya dilakukan sebagai respon dari amatan terhadap kondisi anak usia dini di sekitar lingkungan PAUD, seperti masih banyaknya anak di kelas rendah SD yang masih belum lancar membaca dan menulis, juga anak-anak yang bekerja di usia dini membantu orang tuanya memulung, dan juga rendahnya kepercayaan diri anak dan remaja.

Biar sudah dewasa-dewasa (mereka) masih seperti minder-minder. Lebih banyak diam dan tidak antusias (di SD). Terkadang mereka bisa putus sekolah karena tidak bersosialisasi dengan orang lain. Mereka merasa minder. Menurut saya, bila sejak kecil diberi motivasi dan dorongan (akan) lebih bagus. Anak yang mengikuti PAUD (terlebih dahulu) akan lebih berani.

Pengelola PAUD Ebenhezer, Desa Kadumbul, Kecamatan Pandawai

Di samping itu, sulitnya akses terhadap sekolah terdekat juga menjadi satu sebab didirikannya PAUD. PAUD Mentari Kasih, PAUD Metanoia, dan TK Praioda merupakan tiga PAUD yang diinisiasi untuk memudahkan akses baik keterjangkauan biaya dan jarak anak usia dini ke layanan PAUD

3.2.2. Operasional PAUD

Dana operasional awal dan pendirian PAUD umumnya berasal dari dana yang dikumpulkan oleh pengelola dan guru melalui sumbangan masyarakat seperti berkat gereja, uang pendaftaran dan iuran rutin peserta didik, dan juga dari keuntungan menjual kue dan sisihan uang pribadi yang dikeluarkan oleh pengelola PAUD. Dari delapan PAUD studi, hanya TK Praioda yang mendapat dukungan awal dari SID (*Sumba Integrated Development*) dan PAUD Metanoia yang mendapat **dana rintisan dari Pemerintah Provinsi NTT (Nusa Tenggara Timur)** sebesar Rp 35.000.000,-.

Bagi PAUD-PAUD yang diinisiasi oleh lembaga atau yayasan seperti TK Praioda dan PAUD Lentera Sumba, biaya operasional umumnya dikelola oleh lembaga masing-masing dan diberikan secara rutin kepada pengelola dan guru PAUD. Beberapa PAUD membebankan uang pendaftaran dan iuran bulanan kepada orang tua sebesar Rp 5.000,- sampai dengan Rp 20.000,- per anak. Meskipun begitu, dana ini tidak secara rutin dapat terkumpul karena banyak orang tua peserta didik yang tidak mampu untuk membayarkannya.

Sumber lain yang juga dapat diakses oleh PAUD berupa dana-dana bantuan yang diberikan oleh pemerintah, baik pusat, kabupaten, dan desa seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus Bantuan Operasional Penyelenggaraan (DAK-BOP) PAUD, dan Dana Desa (DD) dengan syarat minimal adanya SK izin operasional dari Pemkab Sumba Timur. Di tingkat nasional, saluran bantuan PAUD bisa berasal dari alokasi APBN berupa DAU dan DAK-BOP PAUD. Empat dari delapan PAUD lokasi studi pernah mendapatkan DAU, kecuali PAUD Lentera Sumba, PAUD Kolowini, TK Praioda, dan terakhir PAUD Mentari Kasih di Rambangaru yang memang selama ini belum pernah mendapat bantuan apapun.

Dua PAUD studi, PAUD Lentera Sumba dan TK Praioda, juga sudah mendapat bantuan DAK-BOP PAUD secara rutin yang diberikan sesuai dengan jumlah peserta didik¹¹. **Permendikbud No. 4 tahun 2019** tentang ‘Petunjuk Teknis Penggunaan DAK-BOP PAUD’ menyatakan bahwa, bantuan diberikan sebesar Rp 600.000,- untuk setiap peserta didik dengan jumlah maksimal bantuan sebesar Rp 36.000.000,- untuk setiap PAUD yang telah memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)¹², dan disalurkan dalam dua periode waktu dalam satu tahun. Tidak banyaknya PAUD yang dapat mengakses dana ini dikarenakan pengelola merasa syarat-syarat yang diajukan untuk mengurus dan mendapatkan NPSN cukup rumit karena keterbatasan pengelola pada informasi, akses dan pengetahuan internet. NPSN harus didaftarkan secara daring (*on-line*) ke dalam sistem yang telah dikembangkan oleh Kemendikbud dengan melampirkan beberapa salinan dokumen, seperti Dapodik¹³ yang berupa data peserta didik per Rombongan Belajar (Rombel) dan data guru, data peserta didik yang ditandatangani oleh pengelola atau kepala PAUD, SK izin operasional PAUD yang masih aktif, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), dan akta notaris apabila tersedia. Selain kepemilikan NPSN, syarat lainnya yang harus dipenuhi PAUD untuk dapat mengakses DAK-BOP PAUD adalah kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan rekening Bank BRI yang masih aktif atas nama PAUD. Dari delapan PAUD studi, selain PAUD Lentera Sumba dan TK Praioda, baru dua PAUD lain termasuk PAUD Metanoia dan PAUD Luku Pala juga telah mendapatkan NPSN. PAUD Metanoia dan PAUD Luku Pala belum mendapatkan DAK-BOP PAUD karena baru mendapat NPSN satu tahun belakang ini. Dari keseluruhan 271 PAUD (TK dan Kober) baru 114 PAUD yang telah memiliki NPSN dan terdaftar dalam sistem Dapodik Kemendikbud.

PAUD Luku Pala, PAUD Metanoia, PAUD Kolowini, PAUD Pelangi Kasih, PAUD Ebenhezer, dan TK Praioda juga sudah mendapatkan bantuan operasional dari Pemdes melalui dana desa. PAUD Mentari Kasih belum mendapatkan dana desa karena belum adanya SK izin operasional yang dikeluarkan oleh Disdik Kabupaten Sumba Timur, sedangkan PAUD Lentera Sumba baru akan

¹¹ Minimal 12 peserta didik dan difokuskan untuk peserta didik berusia 4-6 tahun.

¹² NPSN merupakan kode pengenal sekolah di Indonesia yang ditetapkan oleh Pusat Data dan Statistik Pendidikan melalui dinas pendidikan kabupaten/kota. Nomor ini digunakan untuk memudahkan pengelolaan data satuan pendidikan. Pengajuan NPSN dilakukan oleh setiap sekolah mengikuti syarat-syarat yang diberlakukan

¹³ NPSN merupakan kode pengenal sekolah di Indonesia yang ditetapkan oleh Pusat Data dan Statistik Pendidikan melalui dinas pendidikan kabupaten/kota. Nomor ini digunakan untuk memudahkan pengelolaan data satuan pendidikan. Pengajuan NPSN dilakukan oleh setiap sekolah mengikuti syarat-syarat yang diberlakukan

direncanakan mendapat bantuan di tahun anggaran 2019 karena fokus Pemdes Kuta sebelumnya hanya ke PAUD inisiatif desa yang kini sudah tidak berjalan.

PAUD mengelola dan menggunakan dana-dana ini untuk pembelian peralatan dan perlengkapan PAUD, program PMT (Pemberian Makanan Tambahan) peserta didik, dan juga insentif untuk para guru. Alokasi DD untuk PAUD umumnya juga berupa bantuan pembangunan dan/atau renovasi gedung PAUD. DAU dan ADD umumnya hanya mengalokasikan insentif guru terbatas untuk dua orang di setiap PAUD. dengan besaran Rp 150.000,- sampai Rp 200.000,- per bulan untuk masing-masing guru. Di tingkat layanan, pengelola dan guru kerap kali membagi total besaran ini sesuai dengan jumlah guru yang ada.

Aktivitas PAUD diselenggarakan selama tiga sampai lima hari dalam satu minggunya. Dalam implementasinya, beberapa PAUD membagi rombel sesuai kategori usia peserta didik dengan durasi 2 sampai 3 jam perharinya. Semakin besar usia peserta didik semakin lama durasi kegiatan yang diselenggarakan. Dari semua PAUD studi, hanya PAUD Ebenhezer yang menyelenggarakan kegiatan PAUD di siang-sore hari untuk menyesuaikan waktu kerja orang tua peserta didik di kebun dan guru.

3.2.3. Kurikulum

Salah satu tujuan program PAUD adalah mempersiapkan peserta didik dalam mengikuti SD, khususnya bagi peserta didik usia 4-6 tahun. Untuk mencapai tujuan ini, dibutuhkan suatu seperangkat rencana dan aturan mengenai arah pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan PAUD yang disebut kurikulum PAUD. Kurikulum dapat memandu guru dalam memfasilitasi PAUD untuk mendukung tujuan di atas dan mampu memberikan kontribusi kepada peserta didik dalam mengembangkan seluruh potensi mereka sebagai bekal di jenjang pendidikan berikutnya.

Sistem pendidikan Indonesia, termasuk PAUD, saat ini menggunakan Kurikulum 2013. Dari delapan PAUD studi, semua pengelola dan guru mengaku sudah pernah mengikuti sosialisasi dan mendapatkan pelatihan tentang Kurikulum PAUD 2013, setidaknya satu kali. Namun, hanya 5 dari 8 PAUD yang menyatakan sudah mulai mengadopsi Kurikulum PAUD 2013, sedang 3 PAUD lainnya termasuk PAUD Ebenhezer, PAUD Mentari Kasih, dan PAUD Kolowini masih menggunakan kurikulum lama yang mereka gunakan selama ini. Sebab utama dari belum diadopsinya Kurikulum 2013 di PAUD-PAUD ini lebih kepada kapasitas guru yang belum mampu menerapkan kurikulum tersebut dalam pengajaran, termasuk juga keterbatasan APE yang dimiliki PAUD untuk mendukung penerapan Kurikulum 2013.

Di sisi lain, pengelola dan guru yang meskipun sudah pernah mengikuti pelatihan Kurikulum 2013, masih banyak yang memahami kurikulum sebatas pada perangkat administratif yang perlu disiapkan, bukan pada program pembinaan dan kegiatan pendidikannya itu sendiri. Hal ini membuat pengelola dan guru cenderung fokus pada penyediaan bukti-bukti administratif seperti buku-buku penunjang kegiatan PAUD, penyusunan program semester, penyusunan RPPM dan RPPH, dan rencana penilaian. Hasilnya, proses pembelajaran PAUD masih dilakukan dengan berpusat pada guru, bukan pada peserta didik dimana anak diperkenalkan kepada konten, bereksplorasi melalui kegiatan

bermain, dan fokus pada komunikasi. Beberapa pengelola dan guru juga masih ada yang memahami kurikulum sebatas waktu operasional PAUD yang perlu dipatuhi sesuai RPPH tanpa mengetahui bagaimana mengelola waktu dan durasi yang ada dan disesuaikan dengan Kurikulum 2013.

Selain keterbatasan dan tantangan di atas, pengetahuan guru dalam mengeksplorasi ide untuk membuat kegiatan bermain yang dapat menstimulasi aspek perkembangan peserta didik masih terbatas, dan hal ini terlihat dan berdampak pada terbatasnya pengetahuan guru dalam membahas tema dan sub tema kegiatan, dan kesulitan guru dalam menerjemahkan anekdot dan pengolahan data. RPPH dan RPPM kerap kali hanya berupa dokumen dan konten yang dikembangkan masih berupa konten baku tanpa ada eksplorasi lebih kepada kebutuhan perkembangan peserta didik.

Kegiatan bermain terpadu berupa aktivitas senam dengan iringan musik seperti yang diterapkan PAUD Metanoia merupakan hal yang bisa ditiru oleh PAUD-PAUD lainnya. Satu kegiatan ini dapat mengembangkan begitu banyak aspek perkembangan anak dalam satu waktu, mulai dari sensori-motorik sampai dengan kognitif dan bahasa. Sebuah aktivitas sederhana minim bahan, namun menyenangkan dan memberi pengaruh besar untuk perkembangan anak.

Dalam rangka merespon banyaknya fenomena anak-anak kelas rendah di SD dengan tingkat kemampuan membaca yang rendah (ACDP 040, 2016), aktivitas PAUD dalam studi ini juga sudah banyak difokuskan pada kemampuan membaca peserta didik. PAUD mempersiapkan peserta didik dengan kemampuan pra-baca dan menulis melalui pengenalan huruf, penyusunan huruf menjadi suku-kata dan kata, dan latihan mengeja. Pendekatan pengajaran ini sebenarnya cukup bertolak belakang dengan Permendikbud No. 18 tahun 2018 tentang 'Penyediaan Layanan PAUD' dalam pasal 9 ayat 2 yang menegaskan bahwa pembelajaran PAUD tidak menggunakan pendekatan skolastik yang bersifat memaksa peserta didik secara fisik maupun psikis untuk memiliki kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Dalam konteks ini, orang tua peserta didik juga mempunyai andil karena harapan yang tinggi pada PAUD dalam mengembangkan keterampilan skolastik anaknya (akan dijelaskan di bawah) dan membebani pengelola dan guru PAUD dalam proses pembelajaran.

3.2.4. Sarana Pendukung

Semua PAUD dalam studi ini sudah mempunyai kelas dalam gedung. Dari delapan PAUD, hanya PAUD Luku Pala, PAUD Lentera Sumba, dan PAUD Kolowini yang sudah mempunyai gedung milik sendiri. PAUD Lentera Sumba menempati gedung milik Yayasan Elkana Yakim, gedung PAUD Luku Pala dibangun oleh Pemerintah Desa Praibakul, sedang PAUD Kolowini mendapat bantuan dari Pemerintah Desa Palakahembi dibantu oleh WLF. Empat PAUD lain seperti PAUD Mentari Kasih, PAUD Metanoia, PAUD Pelangi Kasih, dan PAUD Ebenhezer masih menempati gedung dan ruangan dalam gereja-gereja yang sewaktu-waktu harus berbagi ruang dengan aktivitas utama gereja. TK Praioda, walaupun sudah membangun gedung sendiri atas bantuan SID, namun lokasi lahan TK masih menumpang pada SD Masehi Mbatakapidu. Kecuali PAUD Pelangi Kasih yang sedang melakukan renovasi gedung sehingga harus beraktivitas dalam ruang yang cukup beresiko bagi peserta didik, kondisi gedung dan ruang-ruang di PAUD lainnya sudah terlihat cukup nyaman dan aman bagi aktivitas fisik peserta didik. Sirkulasi udara dan pencahayaan yang cukup sudah dilengkapi

di setiap PAUD. Beberapa gedung PAUD juga sudah dilengkapi dengan toilet dan fasilitas cuci tangan peserta didik.

Semua PAUD studi telah memiliki APE (Alat Permainan Edukatif) dalam ruang baik yang diperoleh dari pembelian sendiri menggunakan dan operasional PAUD dan juga pemberian dari pihak luar PAUD. Meski demikian, ketersediaan APE di masing-masing PAUD studi sangat berbeda dari segi kuantitas dan kualitasnya. Dari amatan dan angket isian PAUD, hanya PAUD Lentera Sumba dan TK Praioda yang mempunyai APE dalam dengan jumlah yang cukup, sedang PAUD lain masih sangat kurang. Umumnya, APE yang dimiliki PAUD berupa balok, *puzzle* bertema, bola, buku cerita, dan poster bertema baik tema hewan, aksara dan huruf, dan lainnya yang direkatkan di dinding kelas PAUD.

Kuantitas APE dalam ruang sebenarnya bukan menjadi dasar bagi kualitas pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas PAUD. Aspek penting dari APE adalah kreativitas yang dikembangkan oleh guru-guru dalam memanfaatkan semua bahan yang ada. Pengelola, kepala PAUD, dan guru masih menganggap kualitas APE dalam ruang dalam konteks APE pabrik yang mereka miliki saat ini masih jauh dari cukup untuk mendukung proses pembelajaran di kelas. Guru menyatakan bahwa mereka kerap membuat APE dari material-material yang ada di sekitar mereka untuk mendukung pembelajaran. Contoh, guru-guru di PAUD Luku Pala yang membuat APE menggunakan biji-bijian lamtoro dan bonggol jagung, dan guru-guru TK Praioda yang memanfaatkan kulit salak, dedaunan, arang kayu, dan juga kerang yang mudah ditemukan di pantai di pesisir Sumba Timur.

Dari delapan PAUD studi, hanya PAUD Lentera Sumba, PAUD Metanoia, dan TK Praioda yang mempunyai APE luar gedung dengan unit yang terbatas pada tangga majemuk, papan luncur, ayunan, dan ban titian baik diperoleh dari pembelian melalui dana operasional, pemberian pihak lain, atau membuat sendiri. PAUD Mentari Kasih, di Desa Rambangaru bahkan hanya mempunyai dua unit ayunan yang secara kualitas sudah sangat beresiko untuk digunakan anak-anak. PAUD lainnya belum mempunyai APE luar gedung dengan alasan keterbatasan dana operasional yang digunakan untuk alokasi kebutuhan lain atau permasalahan halaman PAUD yang kurang luas.

APE merupakan suatu wahana yang dapat digunakan dalam stimulasi aspek perkembangan anak. Namun begitu, dari hasil observasi terlibat, semua guru di PAUD studi membebaskan anak untuk menggunakan APE tanpa struktur dan tanpa adanya pendampingan tertentu dari guru. Guru juga mengakui bahwa mereka belum pernah mendapatkan pelatihan secara khusus mengenai cara pemanfaatan optimal dari setiap APE yang ada, baik di dalam dan luar gedung.

Gambar 2: APE dalam dan luar gedung yang dimiliki PAUD. Guru juga membuat APE dari pemanfaatan bahan lokal



Sarana pendukung lain yang umumnya diperlukan PAUD adalah perlengkapan kelas seperti kursi, meja, dan papan tulis di ruang kelas. Meja dan kursi dibutuhkan untuk menunjang postur peserta didik agar tetap tegak saat pengembangan motorik halus seperti menggambar, mewarnai, meronce, menulis dan lainnya. Selain membuat postur belajar lebih tepat, posisi duduk yang baik juga dapat menunjang adaptasi posisi

duduk di SD nanti. Dari semua PAUD studi, hanya PAUD Mentari Kasih yang belum menyediakan meja di dalam kelasnya. Tujuh PAUD lainnya menggunakan meja kayu, meja plastik, meja lipat atau setidaknya menggunakan kursi sebagai pengganti meja yang dapat digunakan peserta didik. Meskipun demikian, banyak guru dari PAUD-PAUD ini yang masih membebaskan peserta didik untuk beraktivitas motorik halus di lantai.

3.3. Tenaga Pendidik

Umumnya guru direkrut dan diseleksi oleh pengelola dan kepala PAUD. Syarat yang ditentukan untuk menjadi guru tidaklah sulit. ‘Guru PAUD’ disyaratkan oleh **Permendikbud No. 137 tahun 2014** tentang ‘Standar Nasional PAUD’ dan Permendikbud No.18 tahun 2018¹⁴ tentang ‘Penyediaan Layanan PAUD’¹⁵ minimal berkualifikasi Diploma IV (D-IV) atau Sarjana (S-1) dan setingkatnya dengan latar belakang studi yang relevan. Sedangkan untuk ‘guru pendamping’ diperbolehkan tenaga pendidik dengan latar belakang pendidikan Diploma III (D-III) atau SMA dan setingkatnya yang telah memiliki sertifikat pelatihan PAUD dari lembaga yang diakui pemerintah. Kebutuhan guru dengan kualifikasi tingkat pendidikan demikian sangat sulit diimplementasikan di tingkat layanan PAUD. Di tingkat provinsi, dari jumlah total 4.175 guru PAUD Provinsi NTT di tahun 2017, hanya 14% guru PAUD yang mempunyai kualifikasi S-1 dan lebih dari 76% masih berijazah SMA sederajat. Sama halnya di tingkat kabupaten Sumba Timur dimana mayoritas guru PAUD di Kabupaten Sumba Timur masih berkualifikasi SMA dan setingkatnya.

Kualitas pendidik masih terbatas. Kebanyakan mereka masih tamatan SMA, bahkan ada yang lulusan paket kesetaraan. Itu hambatan kami di Sumba Timur. Ada (guru)

¹⁴ Bab VII Standar Pendidik dan Tenaga Pendidikan; Pasal 25 & Pasal 26

¹⁵ Pasal 10 ayat 1

yang (sudah) sarjana, tapi masih minim. Syaratnya seharusnya S-1 sebenarnya, tapi kondisi kami di lapangan, sarjana-nya memang minim. Kalau dilihat dari imbalan jasanya masih tidak sesuai dan masih sangat tidak manusiawi. Tapi karena 'panggilan' (moral agama), mereka mau.

Staf Dinas Pendidikan

Dalam studi ini, temuannya cukup bertolak belakang. Dari PAUD lokasi studi, sebagian besar (18 orang) guru telah menuntaskan pendidikan sarjana¹⁶, satu orang guru di PAUD Lentera Sumba bahkan mempunyai ijazah S-2, sedang sebagian lainnya (10 orang) masih berijazah SMA dan setingkatnya. Dari delapan PAUD, hanya PAUD Luku Pala dan PAUD Kolowini yang keseluruhan gurunya masih berkualifikasi lulusan SMA, sedang PAUD lain setidaknya mempunyai satu guru dengan ijazah S-1. Akses ke perguruan tinggi di Sumba Timur kini juga semakin mudah dengan diselenggarakannya Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ) dari Universitas Terbuka di Kota Waingapu yang memungkinkan pembelajaran antara mahasiswa dan dosen dilakukan secara daring.

Dalam amatan di dalam kelas, tingkat pendidikan guru dengan kreativitas individual dan responsivitas terhadap kebutuhan anak dalam melakukan pembelajaran juga terlihat berbanding lurus. Guru-guru dengan kualifikasi sarjana nampak lebih terstruktur dan metodis, sehingga walaupun guru tidak memiliki latar belakang PGPAUD dan wawasan yang mumpuni tentang ke PAUD-an, guru tetap lebih responsif terhadap anak dibandingkan guru dengan kualifikasi lulusan SMA dan setingkatnya.

Sebagian besar guru dalam PAUD studi ini telah mengikuti pelatihan tentang PAUD, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah atau lembaga mitra pemerintah daerah lainnya. Disdik Kabupaten Sumba Timur secara rutin juga mengadakan pelatihan untuk peningkatan kapasitas guru PAUD dalam kuota yang terbatas. Beberapa lembaga mitra pemerintah seperti WVI, Yayasan SID, Yayasan Adjarmanu, Yayasan Charis Indonesia dan lembaga gereja lainnya juga pernah mengadakan pelatihan sejenis. Karena kuota peserta yang terbatas, umumnya PAUD hanya mengirimkan kepala sekolah atau guru senior yang mengikuti pelatihan, untuk kemudian akan membagi pengetahuan dan materi pelatihan yang mereka dapat kepada guru-guru lain di PAUD masing-masing. Beberapa Pusat Kegiatan Gugus (PKG) di tingkat kecamatan juga sudah terbentuk. PKG merupakan suatu wadah bagi guru-guru PAUD di wilayah kecamatan sebagai forum beraktivitas, berkumpul, belajar, dan berkomunikasi guna meningkatkan kemampuan dengan cara belajar bersama di antara guru dan didukung oleh IGTKI/Himpaudi cabang kabupaten masing-masing.

Syarat lain yang umumnya ditetapkan oleh pengelola dan kepala PAUD saat perekrutan guru adalah kesiapan individu untuk melayani, rendah hati, tidak punya masalah perilaku, dan sayang terhadap anak. Oleh karenanya, banyak PAUD yang merekrut guru yang mempunyai pengalaman di sekolah minggu atau jemaat gereja yang memenuhi kriteria ini.

¹⁶ Umumnya dengan latar belakang studi PGPAUD dan teologi.

Guru umumnya mendapatkan hak berupa insentif dari PAUD yang berasal dari sisihan kumpulan dana operasional seperti iuran rutin bulanan peserta didik, DAU, DD, kebijakan yayasan, dan DAK-BOP PAUD. Untuk yang terakhir, menurut **Permendikbud No. 4 tahun 2019** tentang ‘Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Nonfisik BOP PAUD’ insentif guru berupa transport pendidik dapat diambil dari total 35% alokasi dana kegiatan pendukung.

Misal, dari Rp 15.000.000 (DAK yang didapat), 10% kami sisihkan untuk (uang) transportasi (guru). Paling satu bulan ada Rp 100.000,- (untuk masing-masing guru). Walaupun (sekecil) begitu kami tetap jalan juga. Dari desa kami juga dapat insentif.

Kepala TK Praioda

Dari keseluruhan dana kumpulan operasional, insentif untuk satu orang guru dalam PAUD-PAUD studi berkisar antara Rp 75.000,- sampai dengan Rp 750.000,- per bulannya, dengan selisih yang sangat besar bila dibandingkan dengan Upah Minimum Regional (UMR) Kabupaten Sumba Timur di 2019 yang telah ditetapkan sebesar Rp 1.793.298,- per bulan. Tanpa adanya ketulusan dalam pelayanan kepada umat dan masyarakat, nampaknya sulit merekrut guru dengan kualifikasi tinggi seperti diamanatkan kebijakan di atas dengan besaran insentif demikian.

3.4. Peserta Didik

3.4.1. Perkembangan Anak

Dalam amatan di kelas di PAUD studi ini terhadap motorik halus dan kasar peserta didik diketahui bahwa, sebagian besar peserta didik sudah dapat memegang dan menggunakan pensil dengan posisi tripod dan membuat garis dengan cukup baik, sedang beberapa anak lainnya masih memegang pensil dengan cara menggenggam. Semua peserta didik juga dapat melakukan gerak spontan dalam melempar dan menangkap bola. Dalam simulasi keseimbangan, mayoritas peserta didik juga dapat berdiri dengan satu kaki dan bertahan selama 7 sampai 10 hitungan. Dalam pengenalan warna, umumnya peserta didik juga sudah mengenal warna sesuai standar usia dan dapat menunjukkan warna sesuai yang dengan yang disebutkan. Hal yang menarik terjadi di PAUD Pelangi Kasih dimana masih banyak peserta didik yang masih banyak mengalami kesulitan dalam menjaga keseimbangan tubuh dan pengenalan warna. Hal ini mungkin dipengaruhi oleh stimulasi motorik kasar terarah yang kurang optimal dilakukan PAUD karena keterbatasan ruangan untuk eksplorasi gerak anak dan lebih banyak fokus kepada aspek kognitif dan pendekatan skolastik. Guru-guru perlu juga memahami bahwa kemajuan satu aspek perkembangan apabila tidak diikuti dan didukung dengan kemajuan aspek lainnya berpotensi pada timbulnya perlambatan belajar di kemudian hari.

Keterampilan membaca dan menulis anak nampaknya juga sudah cukup terstimulasi. Keterampilan kognitif peserta didik berkembang lebih baik dibandingkan dengan keterampilan sensori-motoriknya. Perkembangan kognitif lebih erat kaitannya dengan perkembangan bahasa. Semakin luas kosa kata bahasa yang anak tangkap, semakin cepat anak menyerap instruksi dan informasi baru. Anak-anak dengan perkembangan kognitif di bawah standar usianya biasanya adalah anak-anak

dengan kemampuan berbahasa yang tidak terlalu lancar akibat tidak dibiasakannya anak mengembangkan bahasa di rumah. Orang tua yang lebih banyak terlibat di PAUD dan melakukan apa yang disarankan guru di rumah, anak-anaknya terlihat lebih berkembang melebihi standar usianya. Dalam konteks perkembangan anak, selama anak mendapatkan perlindungan yang optimal di dalam rumah dan keluarga, eksplorasi mandiri yang dilakukan mereka secara otomatis akan mengembangkan keterampilan motorik kasar dan halus sekaligus.

Hasil observasi kelas juga menemukan bahwa, aspek-aspek perkembangan pada peserta didik kelas besar yang sebelumnya mengikuti kelas rendah di PAUD, lebih baik dari pada peserta didik yang baru masuk. Jadi semakin dini aspek-aspek perkembangan anak distimulasi, semakin cepat juga perkembangan seorang anak dalam merespon lingkungannya.

Dalam sesi wawancara dengan orang tua, mereka menyatakan bahwa banyak perubahan yang terjadi pada anak-anak mereka setelah berkegiatan di PAUD. Beberapa orang tua juga berpendapat bahwa harapan-harapan awal mereka saat mendaftarkan anak ke PAUD sudah mulai terlihat. Umumnya orang tua sudah melihat perubahan pada setiap aspek-aspek perkembangan mulai dari sosial-psikologis, kognitif, bahasa dan moral-agama. Aspek fisik nampaknya tidak menjadi amatan utama orang tua, sejak aktivitas fisik anak-anak mereka berkembang dengan eksplorasi lingkungan sekitar, baik datang atau tidak ke PAUD.

Orang tua melaporkan bahwa kini anak-anak mereka lebih terlihat mandiri, berani bertemu dengan orang lain, lebih mudah menuruti apa yang orang tua katakan. Beberapa orang tua menyatakan bahwa anak-anak mereka sudah mulai mandi, cuci tangan, dan makan tanpa harus dibantu oleh orang tua atau saudaranya yang lebih besar. Mereka juga sudah tidak merasa malu apabila harus berbicara dengan orang yang baru mereka kenal dan mulai mengerti apa yang diminta dan dinasehatkan oleh orang tua.

Anak jadi berani, yang dulunya beraninya lebih ke arah berani melawan (bandel dan rewel), sekarang beraninya lebih ke arah berani untuk aktif dan berinteraksi dengan teman-teman yang lain. Kalau di rumah (dia) juga berani cerita tentang apa saja yang dipelajari di sekolah.

Ibu di PAUD Lentera Sumba

Sejak masuk PAUD, anak jadi lebih bisa diatur dan penurut. Dulunya sangat bandel, tidak bisa mendengarkan kata orang tua. Selain itu, anak juga jadi berani dan pintar.

Ibu di PAUD Kolowini

Dari aspek bahasa dan kognitif, selain anak lebih berani mengungkapkan dan menceritakan sesuatu dengan artikulasi yang lebih jelas, anak juga mulai banyak membaca dan mulai mempunyai keterampilan matematika seperti berhitung sederhana.

3.4.2. Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)

PAUD Mentari Kasih dan PAUD Metanoia mempunyai masing-masing satu peserta didik yang berkebutuhan khusus, walaupun pengelola dan guru tidak dapat mendefinisikan secara jelas apa perbedaan yang menjadikan anak-anak itu berkebutuhan khusus. Namun demikian, kesadaran pengelola dan guru bahwa seorang anak membutuhkan pendekatan yang berbeda dengan peserta didik lainnya sudah cukup baik, terlepas dari apakah pendekatan yang diambil sudah sesuai atau belum.

Dari amatan pada ABK di PAUD Mentari Kasih diketahui bahwa seorang anak memiliki perbedaan pada pigmen kulit (albino) dan penglihatan yang lebih sensitif pada cahaya. Pendekatan khusus yang dilakukan guru berupa mengajak anak untuk maju ke depan dan mendekati pada objek tulisan. Di PAUD Metanoia, satu orang anak terindikasi selective mutism yang aktif berbicara di rumah tapi bisu di lingkungan lain termasuk di sekolah. Guru PAUD Metanoia berusaha melakukan pendekatan dengan terus mengajak anak berbicara dan mengajak peserta didik lain untuk berinteraksi dan bermain dengan anak tersebut.

Beberapa tahun sebelumnya, PAUD Koloweni dan PAUD Pelangi Kasih juga mempunyai peserta didik berkebutuhan khusus. Saat itu, satu peserta didik PAUD Koloweni mempunyai kelainan jantung yang harus didampingi dan digendong oleh ibunya, sedang satu peserta didik di PAUD Pelangi Kasih merupakan anak dengan retardasi mental. ABK yang disebut terakhir sangat membutuhkan pendekatan yang intensif dengan melakukan pengulangan materi lebih banyak dibandingkan dengan peserta didik lainnya, bahkan dengan penambahan alokasi waktu tertentu dengan harapan peserta didik siap bersekolah ke SD

3.5. Orang Tua dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

3.5.1. Orang Tua dan Perkembangan Anak

Orang tua dan keluarga menjadi bagian yang sangat penting dalam perkembangan anak usia dini. Oleh karenanya, pelibatan orang tua dalam proses pendidikan dan perkembangan anak di PAUD diyakini dapat menjadi faktor krusial dalam tumbuh kembang anak yang semakin baik dimana layanan PAUD hanya memberikan porsi kecil¹⁷ stimulasi aspek perkembangan anak dibandingkan dengan aktivitas anak di rumah.

Orang tua sebagai bagian masyarakat dimana PAUD didirikan umumnya terlibat dalam inisiasi PAUD karena kebutuhan pendidikan anak-anak mereka. PAUD Luku Pala, PAUD Metanoia, dan TK Praioda adalah tiga dari layanan PAUD yang didirikan karena kebutuhan dan partisipasi orang tua peserta didik dan masyarakat desa. Di lain sisi, bagi PAUD, partisipasi orang tua paling minimal setidaknya dengan mendaftarkan, membawa, dan mengantar-jemput anak-anaknya ke PAUD. Walaupun diakui oleh sebagian besar pengelola PAUD bahwa anak-anak usia dini di wilayahnya sudah terdaftar di PAUD, namun peran mendampingi peserta didik ke PAUD kerap kali masih dilakukan oleh anak-anak yang lebih besar, seperti mengantar adik-adiknya bersama-sama saat

¹⁷ Setidaknya 900 menit (15 jam) dalam satu minggu

berangkat ke sekolah, sementara orang tua masih sibuk dengan persiapan ke kebun dan urusan pekerjaan rumah tangga lainnya.

Dari sisi orang tua, umumnya motivasi mereka memasukkan anak-anak ke PAUD dalam rangka untuk meningkatkan keberanian anak dalam berinteraksi, menjadikan anak mereka pintar dan sukses di masa depan, persiapan masuk SD, bersosialisasi dengan teman sebaya, atau sekadar menitipkan anak mereka daripada lebih banyak bermain di rumah sementara orang tua sibuk bekerja. Walaupun peran ibu terlihat dominan dalam hal pengasuhan, keputusan dalam memasukkan anak ke PAUD datang dari keputusan bersama antara orang tua laki-laki dan perempuan. Selain itu, nenek dan tante juga menjadi pihak penentu dalam mendorong orang tua-orang tua muda untuk memasukkan anaknya ke PAUD.

Apabila melihat Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD (Kemendikbud dan Kemenag) untuk usia 3-6 tahun di Kabupaten Sumba Timur, trennya selalu mengalami kenaikan di setiap tahunnya. Dari tahun 2012 sampai tahun 2017, APK PAUD di Kabupaten Sumba Timur mengalami kenaikan sebesar 7,46%. Di tahun 2017, menurut data yang dirilis Kemendikbud, APK PAUD di Kabupaten Sumba Timur jauh lebih tinggi apabila dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lain di pulau Sumba, bahkan juga lebih tinggi dari APK PAUD di tingkat provinsi dan nasional (lihat gambar 3 di bawah). Hal ini mengasumsikan bahwa, terlepas dari tingkat kehadiran peserta didik yang rendah dan fluktuatif, mayoritas anak usia 3-6 tahun di Kabupaten Sumba Timur sudah terdaftar di PAUD.

Beberapa PAUD juga mewajibkan orang tua untuk membayarkan biaya pendaftaran, iuran rutin bulanan, dan biaya lain seperti seragam dan acara wisuda peserta didik. Meski masih dalam besaran yang terjangkau, menurut pengelola dan guru, masih banyak juga orang tua yang tidak menyanggupi untuk membayarkan biaya yang telah ditetapkan bersama.

Keluarga yang menjadi anggota PKH juga sering tidak lancar membayar SPP, karena dalam satu keluarga banyak anak juga yang harus dibiayai sekolahnya (SD dan SMP). Makanya, kalau kita minta untuk satu bulan (membayar), ya terkadang di bulan kedua baru kasih masuk (pembayaran SPP). Dari seluruh anak didik, setengahnya tergolong tidak mampu.

Pengelola PAUD Luku Pala, Desa Praibakul, Haharu

Peran lain orang tua dalam pengembangan PAUD juga dilakukan melalui partisipasi perawatan dan pembangunan fisik gedung PAUD seperti terlihat pada PAUD Luku Pala dan TK Praioda dimana orang tua membantu merawat gedung dengan cara membersihkan halaman, membangun pagar, termasuk menyumbang tenaga dan material untuk renovasi teras gedung PAUD untuk kenyamanan dan keamanan anak-anak mereka.

Pas rapat orang tua, saya coba lemparkan (ide ini). Maksudnya, orang tua yang sumbang semen, tenaga, dan kerja. (Material) Pasirnya kami ambil bersama orang tua dari kali di sana. (kami) berpartisipasi sama-sama.

Kepala TK Praioda

Semua orang tua menyatakan tidak ada preferensi gender untuk prioritas pendidikan anak-anak mereka. Anak perempuan dan anak laki-laki mempunyai kesempatan yang sama dalam pendidikan di keluarga mereka. Data dapodik di tingkat kabupaten pun memperlihatkan temuan sejenis. Imbangan persentase dari total 6.721 anak usia dini yang terdaftar di PAUD, antara peserta didik laki-laki dan perempuan adalah 49,8% dan 50,2%. Data dari Kemendikbud terhadap APK anak-anak Sumba juga menyatakan hal yang sejenis dimana APK antara anak laki-laki dan perempuan mempunyai rasio yang berimbang, setidaknya sampai tingkat SMP¹⁸.

Seperti sudah dijelaskan di atas, guru-guru PAUD cenderung masih mengajarkan kemampuan skolastik kepada peserta didik dan fakta ini juga menjadi sesuatu yang diharapkan oleh orang tua peserta didik. Banyak orang tua masih mengharapkan dengan mendaftarkan anaknya ke PAUD agar dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan berhitung, membaca, dan menulis. Orang tua melihat bahwa keterampilan-keterampilan ini merupakan pendukung agar anak-anak mereka lebih mudah diterima dan mengikuti pelajaran di SD. Keterampilan lain yang menurut orang tua penting dalam perkembangan anaknya adalah keterampilan mengenal warna, mewarnai, menggambar, dan menyanyi. Beberapa orang tua juga menekankan pentingnya keterampilan pengenalan diri, berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang lain khususnya dengan orang yang lebih tua, serta ketaatan kepada Tuhan dan agamanya.

Semua PAUD menyatakan melakukan pertemuan rutin dengan orang tua peserta didik secara rutin dengan rentang minimal satu sampai enam bulan sekali dalam setahunnya. TK Praioda, yang sudah mengembangkan Kelompok Bermain Keluarga (KBK) dan PAUD Metanoia yang telah terafiliasi dengan Bina Keluarga Balita (BKB) mengadakan pertemuan rutin dengan orang tua satu kali dalam sebulan dan dipandu oleh Kepala PAUD dan guru. Dalam pertemuan ini, pengelola dan guru PAUD memberikan materi-materi pengasuhan kepada orang tua dan cara stimulasi dan deteksi perkembangan anak usia dini di rumah oleh orang tua. Umumnya, pertemuan diselenggarakan bersamaan dengan hari Posyandu di lokasi terdekat dengan PAUD. Pertemuan rutin tiga bulanan dan enam bulanan lainnya dilakukan PAUD saat pengambilan hasil laporan perkembangan anak yang disisipi pesan-pesan pengasuhan dan perlindungan anak kepada orang tua di rumah disamping membahas operasional PAUD, masalah kehadiran peserta didik, dan rencana PAUD ke depan.

Hampir semua PAUD memberikan Pekerjaan Rumah (PR) untuk peserta didik. Dalam pengasuhan di rumah, sebagian besar orang tua (umumnya para ibu) menyatakan bahwa mereka berupaya untuk mendampingi anak mengulangi apa yang sudah mereka dapat di PAUD di hari itu, atau setidaknya mengingatkan anak untuk mengerjakan PR yang diminta guru dan mengamati dari kejauhan

¹⁸ Diramu dari data Kemendikbud yang diakses melalui <http://apkpm.data.kemdikbud.go.id>

sementara mereka sibuk melakukan pekerjaan domestik di dapur, sekitar rumah atau berdagang kecil-kecilan di depan rumah. Anak-anak yang lebih tua juga berperan sebagai pendamping adik-adiknya dalam pengulangan pelajaran dengan memberikan contoh pada PR yang diberikan oleh guru PAUD.

Ya, biasanya saya (ibu) selalu mendampingi untuk memberi pelajaran tambahan saat di rumah (misal belajar huruf, angka, mengeja, belajar warna), karena kadang tidak puas dengan yang sudah diajarkan di sekolah. Terlebih lagi jika tahu kalau hari itu anak tidak belajar apa-apa di sekolah. Oleh gurunya hanya dibiarkan lari-larian saja di luar.

Orang Tua di PAUD Ebenhezer

Pengelola dan guru-guru PAUD juga menyadari bahwa peran ibu lebih dominan dari peran bapak dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak-anak. Paternal responsibility dari peran ayah baru sebatas pemberian nama, pemenuhan kebutuhan ekonomi seperti pangan, pakaian, dan biaya pendidikan. Peran pengembangan sosial-psikologis anak serta moral-agama masih belum terlalu terlihat pada ayah di lokasi PAUD studi. Padahal, hasil dari beberapa studi menyatakan bahwa anak tanpa pengasuhan seorang ayah akan menyebabkan terjadinya ‘kepincangan’ perkembangan yang dapat menghambat kemampuan akademis, aktivitas dan interaksi sosial anak. Fenomena ini disadari oleh pengelola dan guru-guru PAUD, khususnya pengelola dari latar Pendeta, yang selalu mendorong para ayah untuk berpartisipasi aktif dalam pengasuhan anak. Seperti contoh yang dilakukan Pengelola PAUD Kolowini yang menyampaikan pada gereja setempat untuk mengembangkan kelompok ayah.

... karena mereka adalah kepala, seorang imam. Sama seperti ikan yang akan rusak jika kepalanya rusak, begitu jugalah rumah tangga dan pengasuhan.

Pengelola PAUD Kolowini

3.5.2. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Keluarga

Hasil survei memperlihatkan bahwa mayoritas ibu (97,0%) tidak memisahkan menu anak dengan orang dewasa di dalam keluarga. Anak pada umumnya makan tiga waktu dalam sehari, saat sarapan pagi, makan siang, dan makan malam. **Menu utama anak dan keluarga** umumnya terdiri makanan pokok seperti nasi dan jagung ditambah sayur yang diolah dari sayuran hijau seperti bayam, sawi, bunga pepaya, pucuk labu, dan daun ubi. Menu tambahan lainnya yang umum berupa telur dan ikan yang mudah didapat di pasar. Daging nampaknya menu yang cukup mewah bagi responden yang tidak dapat dikonsumsi secara rutin. Dari 34 ibu, hanya 1 orang ibu yang merespon bahwa anaknya mengkonsumsi daging pada hari sebelum survei. Beberapa ibu juga memberikan selingan sore kepada anak-anaknya berupa kue, biskuit atau makanan ringan lain yang dibeli dari warung atau membuatnya dari bahan-bahan lokal seperti buah sukun, ubi jalar, kelapa, pisang, dan kacang hijau.

Dilihat dari kecukupan gizi, nampaknya sebagian besar anak-anak Sumba Timur sudah mengkonsumsi 4 jenis dan lebih makanan dalam sehari-hari. Catatan tentang status gizi balita di Kabupaten Sumba Timur juga sudah semakin meningkat. Namun demikian status gizi anak di Sumba Timur masih cukup memprihatinkan. Walaupun sudah terjadi penurunan angka *stunting* dari sekitar 50% di tahun 2014 menjadi sekitar 39% di tahun 2018, **Kabupaten Sumba Timur masih termasuk satu dalam 100 kabupaten prioritas penanganan *stunting*** yang ditetapkan oleh Kantor Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia. Insiden kasus gizi buruk pada anak Kabupaten Sumba Timur di tahun 2018 sendiri masih cukup tinggi dengan catatan 135 kasus anak mengalami gizi buruk. Di tahun yang sama juga terjadi tujuh kasus kematian ibu, 45 kematian bayi, dan 15 kasus kematian balita.

Dalam hal kebersihan dan sanitasi, baru 73,5% keluarga yang dapat mengakses air bersih melalui sumur timba (35,3%), air yang disalurkan melalui pipa (32,4%), dan mata air terlindungi (5,9%). Sedangkan 26,5% lainnya masih menggunakan air permukaan seperti sungai. Umumnya ibu menyaring air (52,9%) terlebih dahulu sebelum direbus (85,3%) dan kemudian dikonsumsi oleh anggota keluarga. Meski begitu, **masih ada sekitar 12% ibu yang menyatakan air langsung dikonsumsi tanpa ada proses sterilasi terlebih dahulu.**

Sebagian besar keluarga sudah mempunyai jamban sendiri (74,5%) dan lainnya masih membuang kotoran di ruangan terbuka seperti kebun, semak-semak, dan tempat terbuka lain. Keluarga-keluarga tanpa jamban masih banyak ditemukan di wilayah perdesaan Pandawai dan Haharu yang jauh dari Kota Waingapu. Beberapa tahun terakhir ini, UNICEF bersama dengan beberapa mitra lokal telah mengimplementasikan program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang menasar beberapa kecamatan di Sumba Timur. Dari 22 Kecamatan yang ada, baru Kecamatan Katala Hamu Lingu yang sudah meraih status bebas buang air besar sembarangan (BABS/ODF *Open Defecation Free*)

3.6. Koordinasi lintas sektoral dan lembaga penyelenggara PAUD

3.6.1. Pemerintah Kabupaten

Pengembangan termasuk didalamnya pendidikan dan kesehatan anak usia dini merupakan satu aspek yang diamanatkan dalam **Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 tahun 2018** tentang ‘Standar Pelayanan Minimal’ kepada Pemerintah Kabupaten/Kota¹⁹. **Permendikbud No. 18 tahun 2018** tentang ‘Penyediaan Layanan PAUD’ di pasal 6 ayat 1 juga menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota mengupayakan ketersediaan layanan PAUD paling sedikit satu PAUD di setiap satu desa/kelurahan. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Disdik Kabupaten Sumba Timur, per akhir tahun 2018, total jumlah layanan PAUD yang terdaftar dan sudah memiliki izin operasional di Kabupaten Sumba Timur mencapai 271 unit termasuk di dalamnya 49 unit TK/RA dan 222 unit layanan Kober dan SPS (Satuan PAUD Sejenis) yang tersebar di 22 Kecamatan dan 16 kelurahan dan 140 desa. Walaupun bila dilihat dari proporsi jumlah unit layanan PAUD lebih banyak dari jumlah kelurahan/desa bukan berarti setiap kelurahan/desa di Kabupaten Sumba Timur telah mempunyai PAUD. Sebaran layanan PAUD masih tidak merata dan berpusat di Kota Waingapu dan sekitarnya,

¹⁹ Bagian kedua tentang SPM pendidikan, pasal 5 ayat 3, dan bagian ketiga tentang SPM kesehatan, pasal 6 ayat 3

dengan jumlah PAUD terbanyak di Kecamatan Pandawai (25 unit) dan paling sedikit di Kecamatan Mahu (1 unit).

Peran Pemerintah Kabupaten dalam pengembangan PAUD sebatas pada peran penetapan pendirian, pembinaan dan pengawasan program PAUD. Pendirian PAUD, menurut **Permendikbud No. 84 tahun 2014**, diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten dan ditetapkan oleh Bupati atas usul Kepala Organisasi Pemerintah Daerah terkait, dalam hal ini Kepala Dinas Pendidikan Sumba Timur. Di Kabupaten Sumba Timur, setidaknya ada lima OPD yang bertautan dengan program anak usia dini termasuk Disdik, Dinkes, DPMD, dan DP3AP2KB yang mempunyai program masing-masing di tingkat kelurahan/desa seperti PAUD, SPS, Posyandu, dan BKB berturut-turut.

Dinas Pendidikan mempunyai porsi yang cukup besar dalam pengembangan program PAUD di tingkat kabupaten. Selain pemberian izin baik pendirian dan operasional, pembinaan dan pengawasan, Disdik juga mempunyai andil dalam konteks operasional PAUD untuk mengakses dana-dana bantuan dari pemerintah pusat. Syarat-syarat pengajuan bantuan seperti DAK-BOP PAUD, sertifikasi dan bantuan lainnya kerap kali harus atas persetujuan dan keputusan dari Disdik. Beberapa PAUD studi yang pernah mendapatkan DAK-BOP PAUD juga mendapat asistensi dari Disdik dalam penyusunan Dapodik dan Rencana Kegiatan Anggaran Satuan (RKAS) PAUD. Selain itu, melalui penilik atau pengawas PAUD, Disdik juga melakukan asistensi teknis dan pengawasan secara rutin, meskipun nampaknya masih dilakukan di PAUD-PAUD di wilayah Kota Waingapu dan sekitarnya. Saat ini hanya satu orang penilik PAUD yang diangkat oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur yang mencakup seluruh wilayah kabupaten. Keterbatasan ini menyebabkan lingkup pemantauan dan pengawasan cukup terbatas. Pelatihan-pelatihan dalam upaya peningkatan kapasitas guru PAUD juga secara rutin diselenggarakan oleh Disdik walaupun dengan kuota peserta dan waktu pelatihan yang terbatas.

DPMD bersama Dinkes mengembangkan dan membina setiap Posyandu yang ada di level desa. Posyandu adalah program nasional dalam upaya pemerataan layanan kesehatan dasar di tingkat desa seperti KIA, gizi, dan KB. Dinkes melalui Puskesmas juga berperan aktif dalam fungsi advokasi ke Posyandu dan PAUD di wilayahnya masing-masing (akan dielaborasi detail di sub-bab Puskesmas di bawah). Walaupun saat ini pemerintah desa mempunyai wewenang yang cukup besar dalam pengembangan Posyandu dan PAUD, fungsi-fungsi pembinaan, pengawasan, dan evaluasi masih berada di Pemerintah kabupaten. DPMD Sumba Timur juga masih mengalokasikan anggaran untuk mendukung kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat sebesar Rp 500.000.000,- dan dana alokasi sebesar Rp 855.000.000,- untuk operasional 570 Posyandu di Kabupaten Sumba Timur. Asistensi dan persetujuan APBDes juga dilakukan oleh DPMD melalui tim ahli tertentu yang telah diamanatkan oleh kebijakan. Di sisi lain, Dinkes melalui APBD II, DAU dan DAK juga masih dapat mengalokasikan PMT bagi balita, ibu hamil, dan ibu menyusui di Posyandu. Di sisi lain, DP3AP2KB melakukan dukungan pada pendirian dan pembinaan program BKB di level kecamatan dan desa.

3.6.2. Pemerintah Desa

Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang ‘Desa’ dan PP No. 60 tahun 2014²⁰, memungkinkan desa untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sendiri sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa melalui penggunaan Dana Desa. Dana Desa berasal dari pendapatan asli desa, bagi hasil pajak dan retribusi daerah dan bantuan lain baik dari alokasi APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten/Kota. Untuk Kabupaten Sumba Timur, total transfer pemerintah pusat untuk Dana Desa trennya semakin meningkat setiap tahunnya. Di tahun 2017 dan 2018, Dana Desa yang ditransfer oleh pemerintah pusat untuk 140 desa di Sumba Timur, berturut-turut sebesar Rp 100.861.880.000,- dan Rp 108.382.480.500,-. Jumlah ini semakin meningkat di tahun anggaran 2019 menjadi sebesar Rp 125.908.849.000,-.

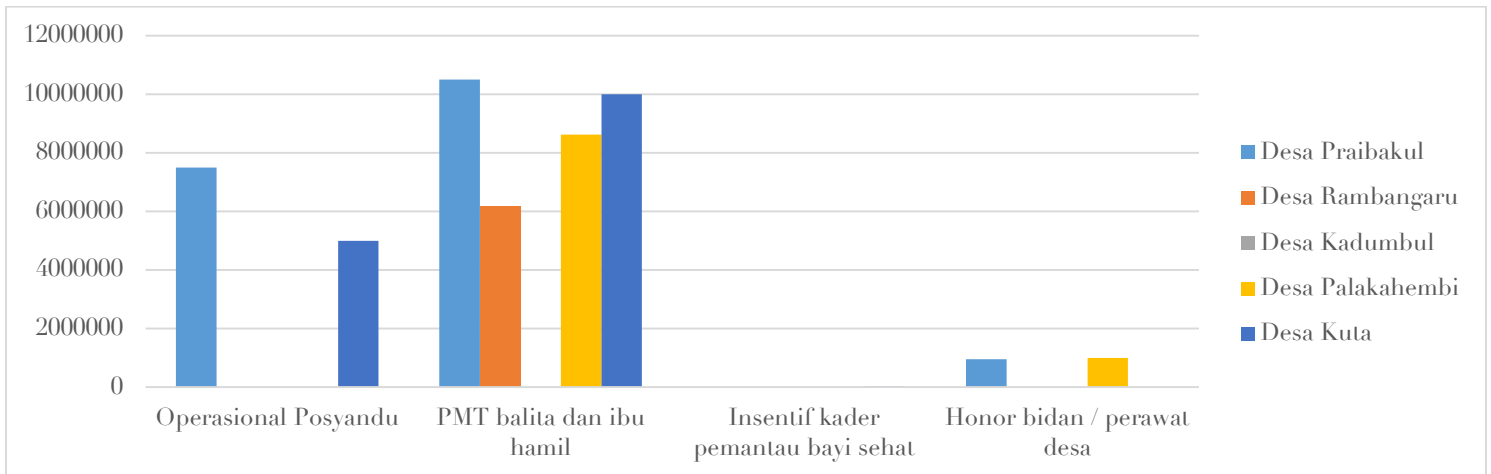
Selain wewenang dalam penggunaan Dana Desa, Pemdes juga mempunyai kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang dan peraturan lainnya dalam menyelenggarakan program di tingkat desa, termasuk program PAUD. Dalam **PP No. 2 tahun 2018 dan Permendikbud No. 18 tahun 2018²¹** dinyatakan bahwa Pemerintah desa bertanggung jawab untuk mendorong dan mengembangkan program PAUD melalui pemberian bantuan keuangan, bantuan sarana dan prasarana, juga bantuan pendidik. Semua desa studi ini sudah mempunyai layanan PAUD lebih dari satu unit layanan, sedang Posyandu sudah tersedia di setiap dusun/kampung/RW dengan jumlah kader 5 orang di masing-masing Posyandu. Pengangkatan kader Posyandu dan juga guru PAUD (di beberapa desa) juga sudah ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepada Desa/Lurah.

Di delapan desa studi ini, **transfer dana desa yang diperoleh masing-masing desa pada tahun 2018** berkisar antara 1,2 sampai 1,4 milyar rupiah. Alokasi DD untuk kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berhubungan dengan PAUD cukup bervariasi di masing-masing kelurahan/desa, minimal dialokasikan untuk insentif kader Posyandu dan guru PAUD. Besaran insentif juga tidak sama. **Besaran insentif kader Posyandu setiap bulannya** di masing-masing kelurahan/desa berkisar antara Rp 40.000,- s/d Rp 100.000,- per orang, dan nilai terbesar dialokasikan oleh Desa Rambangaru, Kecamatan Haharu. Sedang insentif untuk guru PAUD berkisar antara Rp 150.000,- s/d Rp 250.000,- setiap bulannya masing-masing guru, meskipun masih terbatas hanya untuk 2 atau 3 guru di setiap PAUD. Alokasi lain DD untuk kegiatan program anak usia dini umumnya diarahkan untuk kegiatan-kegiatan seperti operasional PAUD dan Posyandu, program PMT, honor bidan desa, juga pembangunan atau renovasi gedung PAUD dan Posyandu. Dari delapan kelurahan/desa, hanya Desa Praibakul yang mengalokasikan kegiatan program anak usia dini yang cukup beragam.

²⁰ Bab IV Pasal 18

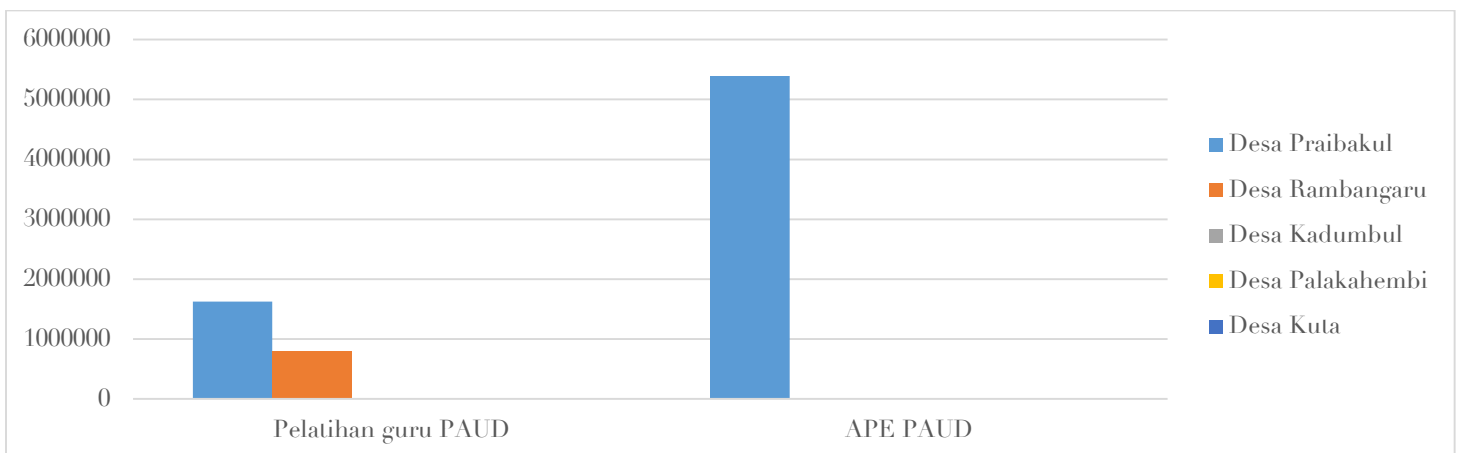
²¹ Pasal 11 ayat 3

Grafik 1: Sebaran Dana Desa untuk Pelayanan Kesehatan



	Praibakul	Rambangaru	Kadumbul	Palakahembi	Kuta
Insentif Kader	50,000	100,000	30,000	50,000	50,000
Pembangunan Posyandu	227,433,100		206,062,700		

Grafik 2: Grafik Sebaran Dana Desa untuk PAUD



	Praibakul	Rambangaru	Kadumbul	Palakahembi	Kuta
Insentif Guru	250,000	250,000	200,000	200,000	250,000
Pembangunan PAUD				288,156,400	
Sarana Prasarana	18,610,000				
Seragam					2,400,000

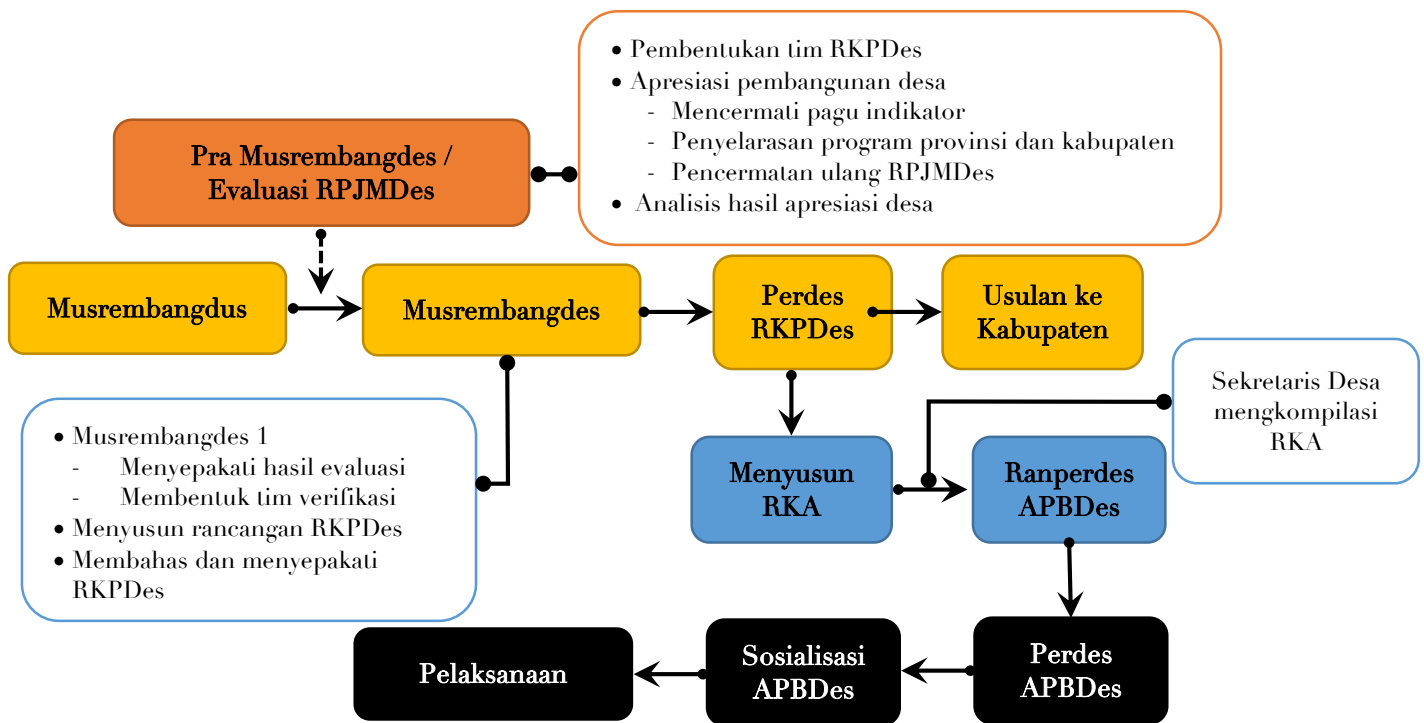
Rencana kegiatan pembangunan desa (RKPDes) dan besaran dana merupakan hasil musyawarah masyarakat desa tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode satu tahun ke depan. Bersama dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), RKPDes menjadi acuan pemerintah desa dalam menyusun APBDDes (lihat gambar 4 di bawah). Guru-guru PAUD dan kader-kader Posyandu secara rutin juga mulai dilibatkan dalam musyawarah-musyawarah

penentuan keputusan rencana kegiatan dan berhak mengajukan usulan-usulan kegiatan yang akan diputuskan oleh pemerintah kelurahan/desa pada nantinya, sesuai proporsi anggaran yang diterima dan prioritas pembangunan desa.

Walaupun tidak sepenuhnya (diberikan sesuai dengan usulan), tapi setiap tahun ada anggaran yang diberikan kepada PAUD. Pemerintah desa juga setuju untuk menambah (perluasan) gedungnya. Sekolah kami sempit, anak-anak juga kurang bebas bermain. Mungkin tahun ini (pemerintah) desa akan menyewa alat berat untuk membersihkan halaman. Tapi syaratnya, apabila kami diberikan dana, kami juga diminta laporan pertanggung jawabannya.

Pengelola PAUD Luku Pala

Gambar 3: Alur penetapan APBDes



3.6.3. Puskesmas

Puskesmas merupakan entitas layanan kesehatan dalam naungan Dinkes Kabupaten/kota yang berada di tingkat kecamatan. Di tingkat desa, satuan unit kerja Puskesmas dapat berupa Pustu (Puskesmas pembantu), Polindes (Pos Bersalin Desa), dan Poskesdes (Pos Kesehatan Desa). Menurut data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Sumba Timur, saat ini ada 22 unit Puskesmas, 78 pustu, dan 73 polindes yang tersebar di 22 kecamatan. Puskesmas berperan dalam melakukan upaya kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya setidaknya dalam hal mengkoordinasikan dan mengintegrasikan penyelenggaraan usaha kesehatan masyarakat dan perseorangan yang lintas program dan lintas sektor, termasuk didalamnya promosi kesehatan, kesehatan lingkungan, KIA dan

KB, gizi dan tumbuh kembang anak usia dini²². Selain itu, Permenkes No. 66 tahun 2014 tentang ‘Pemantauan Pertumbuhan, Perkembangan, dan Gangguan Tumbuh Kembang Anak’ dan Permenkes No. 25 tahun 2014 tentang ‘Upaya Kesehatan Anak’ juga mengamankan Puskesmas melalui tenaga kesehatan berperan sebagai penyelenggara pemantauan tumbuh kembang anak bersama dengan guru PAUD dan orang tua peserta didik. Menurut pengalaman petugas Puskesmas, guru-guru PAUD dulu juga pernah berperan aktif dalam pemantauan tumbuh-kembang peserta PAUD, dan telah dilatih dalam teknik menimbang dan mengukur tinggi badan anak yang kemudian rekapitulasi catatan antropometri menjadi data dan informasi Puskesmas. Namun saat ini, pelatihan-pelatihan sejenis sudah tidak pernah lagi dilakukan oleh Dinkes Kabupaten Sumba Timur.

PAUD-PAUD di Kabupaten Sumba Timur yang telah mempunyai SK izin operasional dari Disdik umumnya telah melakukan kerjasama dengan Puskesmas terdekat melalui Pemerintah Kecamatan. Puskesmas melakukan kunjungan ke PAUD umumnya dua kali dalam setahun, di bulan Februari dan Agustus yang merupakan bulan-bulan program pemberian vitamin A untuk anak usia dini. Selain pemberian vitamin A, layanan kesehatan yang umumnya diberikan kepada anak usia dini di PAUD berupa pengukuran status gizi anak melalui antropometri, SDIDTK, promosi hidup bersih dan sehat, dan program PMT apabila ada anggaran yang tersedia. Layanan ini cukup minimal dibandingkan dengan yang diamanatkan oleh Permenkes No. 66 tahun 2014 dimana layanan kesehatan lain seperti pemberian obat kecacingan, CTPS sebelum dan sesudah makan, dan gosok gigi bersama juga merupakan termasuk dari pokok-pokok kegiatan layanan seperti yang dilakukan oleh Puskesmas Kawangu di wilayah cakupannya.

Kami ada bantuan PMT ke PAUD, ada program PSGA (Pemantauan Status Gizi Anak) setiap bulan, ada program CTPS (Cuci Tangan Pakai Sabun) setahun sekali, dan program Demo Sikat Gigi (bersamaan dengan pemeriksaan gigi rutin) setahun sekali dengan lokasi pelaksanaan di PAUD. Sejauh ini, kegiatan Posyandu dan PAUD ada yang gabung, ada (juga) yang dipisah. Kalau dulu, PAUD jadi satu dengan Posyandu. Tapi sejak beberapa tahun terakhir sudah dipisah. Tapi saat jadwal Posyandu, anak-anak PAUD yang masih usia balita pasti datang ke Posyandu.

Bidan Koordinator Puskesmas Kawangu

Survei terhadap orang tua peserta didik juga mengungkapkan temuan yang sama. Dari 34 orang ibu, 100% menyatakan bahwa anak-anak mereka pernah mendapatkan vitamin A, namun kurang setengah (47,1%) dari mereka yang menyatakan pemberian vitamin A dilakukan di bulan lalu (Februari 2019), 50% menyatakan anaknya menerima kapsul vitamin A di tahun lalu (Agustus 2018), dan sisanya mengaku tidak ingat kapan terakhir anaknya menerima kapsul vitamin A baik saat di Posyandu atau di PAUD. Di sisi lain, lebih dari setengah (55,9%) dari 34 orang ibu yang menyatakan bahwa anak-anaknya belum pernah mendapatkan obat kecacingan selama ini. Sebagai tambahan, dalam program

²² Permenkes No. 75 tahun 2014 tentang ‘Pusat Kesehatan Masyarakat’

nasional tertentu Puskesmas juga memberikan layanan ke peserta didik PAUD seperti saat Pekan Imunisasi Nasional (PIN), juga imunisasi penanggulangan campak dan meningitis.

3.6.4. Posyandu

Jumlah Posyandu di Kabupaten Sumba Timur saat ini mencapai 570 unit layanan. Umumnya layanan Posyandu dilakukan dalam satu dusun atau RW. Bila melihat pada tabel 5 di bawah, imbalan antara jumlah Posyandu dengan jumlah RW masih cukup jauh, tapi bila dibandingkan dengan dusun, jumlah Posyandu yang ada sudah melebihi jumlah dusun/kampung. Jumlah ini adalah suatu modal bagi Kabupaten Sumba Timur untuk mengimplementasikan kebijakan standar layanan minimum kesehatan di tingkat desa.

Aktivitas utama Posyandu biasanya terbatas pada penimbangan, pencatatan hasil timbangan anak, pemberian vitamin A secara rutin dua kali dalam setahun, PMT pada balita dan ibu hamil, konseling kepada ibu hamil dan menyusui, kunjungan rumah ke keluarga sasaran yang beresiko, keluarga berencana, dan pemberian obat cacing kepada balita. Akan tetapi tiga aktivitas terakhir sudah sangat jarang dilakukan oleh kader-kader Posyandu dan staf Puskesmas pendamping. Aktivitas-aktivitas ini sering kali menjadi acuan dan indikator penilaian dalam strata Posyandu. Secara sederhana, semakin banyak, lengkap dan terpadunya aktivitas yang dilakukan satu Posyandu dan cakupannya, semakin meningkat stratanya. Menurut standar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kemenkes strata Posyandu dibagi menjadi lima tingkatan berturut-turut yakni ‘pratama’, ‘madya’, ‘purnama’, dan ‘mandiri’ dengan indikator-indikator penilaian masing-masing.

Table 4: Sebaran Posyandu di setiap Kecamatan di Kabupaten Sumba Timur tahun 2019

No	Kecamatan	Desa & Kelurahan	Dusun	RW	Posyandu
1	Kota Waingapu	7	12	61	32
2	Kambera	8	3	52	39
3	Pandawai	7	18	49	38
4	Kanatang	5	9	26	21
5	Haharu	7	15	31	21
6	Nggaha Ori Angu	8	28	56	24
7	Lewa	8	25	55	28
8	Lewa Tidahu	6	17	34	16
9	Katama Hamu Lingu	5	14	26	14
10	Tabundung	10	29	56	32
11	Karera	7	17	30	21
12	Kahaungu Eti	9	28	44	33
13	Kambata Mapambuhang	6	14	27	21
14	Matawai La Pawu	6	14	29	25
15	Pinu Pahar	6	14	34	22
16	Paberiwai	7	25	41	21
17	Ngadu Ngala	5	14	33	13
18	Mahu	6	28	46	17
19	Rindi	8	16	35	30
20	Umalulu	10	23	55	42
21	Wulla Waijelu	7	17	34	23

Menurut data dari Dinkes dan DPMD Sumba Timur, dari 570 total jumlah Posyandu yang ada, baru ada 4 Posyandu dengan strata ‘mandiri’, sedang 228 Posyandu lain masih berstrata ‘madya’, 154 yang ‘purnama’, dan sisa 184 lainnya masih berstrata ‘pratama’. Posyandu-Posyandu yang mempunyai strata ‘mandiri’ umumnya sudah mempunyai gedung sendiri dan masih berlokasi dekat dengan Kota Waingapu. Dapat diasumsikan bahwa kegiatan-kegiatan pengembangan anak usia dini lainnya sudah dilakukan di Posyandu-Posyandu ini.

No	Kecamatan	Desa & Kelurahan	Dusun	RW	Posyandu
22	Pahunga Lodu	8	30	58	37
Jumlah		156	410	912	570

Setiap Posyandu dikelola oleh lima orang kader termasuk di dalamnya satu orang ketua

kader. Saat ini tercatat ada 2.870 kader Posyandu yang ada dalam daftar DPMD dan Dinkes yang sebagian besar telah mengikuti pelatihan-pelatihan Posyandu, minimal pelatihan pengelolaan Posyandu seperti manajemen lima meja, cara mengisi Kartu Menuju Sehat (KMS), cara menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan anak, dan teknik menyuluh. **Insentif kader** umumnya diberikan oleh Pemerintah Desa melalui alokasi dana desa yang besarnya antara Rp 30.000,- s/d Rp 100.000,- per bulan untuk masing-masing kader, dan juga alokasi bantuan dari DPMD Kabupaten Sumba Timur. Untuk anggaran tahun 2019, DPMD Sumba Timur mengalokasikan sebesar Rp 1.500.000,- per tahun untuk masing-masing Posyandu.

Table 5: Sebaran Posyandu dengan strata 'mandiri' tahun 2019

No	Nama Posyandu, Desa	Kecamatan
1	Cempaka Putih, Hambala	Kota Waingapu
2	Dahlia, Mau Hau	Kambera
3	Matahari, Malumbi	
4	Mawar, Malumbi	

Indikator lain dari capaian sebuah Posyandu juga dapat dilihat dari proporsi SKDN Posyandu yang merupakan pembagian dari total jumlah anak yang ada dalam cakupan Posyandu (S) dengan jumlah anak yang datang dan ditimbang pada satu waktu (D). Umumnya orang tua membawa anak-anaknya ke Posyandu secara

rutin di 12 bulan pertama anak dilahirkan atau setidaknya sampai lengkap imunisasi yang diterima anak²³. Namun begitu, menjelang ulang tahun anak kedua, banyak orang tua mulai jarang membawa anak-anaknya ke Posyandu walaupun sekadar memantau pertumbuhan anaknya. Dari hasil survei terhadap orang tua peserta didik di PAUD juga ditemukan hal yang sama, dimana hanya 41,2% anak-anak yang ditimbang di Posyandu di bulan ini atau bulan kemarin, dan sisanya pernah ditimbang di Posyandu lebih dari dua bulan yang lalu.

3.6.5. Bina Keluarga Balita

Walaupun sudah dikembangkan selama puluhan tahun di tingkat nasional, Program BKB sebagai program pendidikan keorang-tuaan di Kabupaten Sumba Timur masih belum cukup dikenal dan belum berkembang secara merata. Saat ini hanya ada 12 BKB yang telah dikembangkan menjadi BKB-HI dan terpadu dengan program PAUD dan Posyandu. Dari delapan PAUD studi, hanya guru di PAUD Metanoia dan PAUD Luku Pala yang pernah mengikuti pelatihan BKB yang diselenggarakan oleh DP3AP2KB. PAUD Metanoia juga sudah menerapkan kegiatan BKB di PAUD sekali setiap bulannya dengan nama BKB Harapan Sumba.

²³ SKDN berasal dari S=Semua balita di cakupan wilayah Posyandu; K=KMS, jumlah balita yang terdaftar di Posyandu dan mempunyai KMS; D=Datang, jumlah balita yang datang ke Posyandu dan ditimbang berat badannya; N=Naik, jumlah balita yang berat-badannya mengalami kenaikan dibandingkan bulan lalu

Table 6: Sebaran BKB HI di Kabupaten Sumba Timur

No	Nama BKB HI, Desa	Kecamatan
1	Anda Luri, Praibakul	Haharu
2	Harapan Sumba, Temu	Kanatang
3	Palonda La Mahamu, Mondu	
4	Grasia, Watumbaka	Pandawai
5	Kasih Ibu, Hambala	Kota Waingapu
6	Sola Grasia, Kamala Puti	
7	Suka Bangun, Lumbu Kore	Umalulu
8	Berdikari, Rindi	Rindi
9	Ningu Monung, Lailunggi	Pinu Pahar
10	Imanuel, Lewa Paku	Lewa
11	Beringin Jaya, Praipaha	Nggaha Ori Angu
12	Anda Luri, Katika Luku	Matawai La Pawu

dan panduan-panduan lainnya. Sedang dalam KBK, walaupun materi yang diberikan kepada orang tua nampak sama namun tidak sesistematis BKB. Dalam KBK, guru TK Praioda yang memberikan materi sekali setiap bulannya.

3.6.6. Organisasi Mitra Pembangunan Pemerintah Daerah

Studi ini menemukan setidaknya **ada lima lembaga mitra pembangunan pemerintah kabupaten** yang bergerak dalam isu anak usia dini. WVI dan ChildFund sudah bekerja bersama dengan Pemerintah Kabupaten Sumba Timur sejak belasan tahun yang lalu. Keduanya mengembangkan program kesehatan ibu dan anak serta pendidikan anak di level desa. Beberapa desa pernah menjadi dampingan program dan sebagian program masih berlanjut sampai saat ini. Namun demikian, arah program WVI beberapa tahun terakhir lebih memokuskan pada isu penghidupan masyarakat desa melalui pertanian masyarakat untuk peningkatan ketahanan pangan dan ekonomi keluarga.

ChildFund melalui Yayasan SID juga sedang mengembangkan program PAUD di 24 PAUD dampingan dengan dukungan dari Barnfonden dan pendanaan dari Uni Eropa. Program difokuskan pada peningkatan kapasitas layanan PAUD dan mitra PAUD termasuk tata kelola PAUD di Kabupaten Sumba Timur. Yayasan Adjarmanu juga mempunyai kiprah yang sangat baik dalam pengembangan Program PAUD. Selain mengembangkan layanan PAUD, Yayasan Adjarmanu juga membantu guru-guru PAUD dalam memperoleh pendidikan yang lebih tinggi dan memberikan pelatihan-pelatihan PAUD sebagai upaya peningkatan kapasitas guru di PAUD dampingan. Lembaga lain dengan fokus sejenis adalah Yayasan Charis Indonesia yang mengembangkan Charis National Academy di Kota Malang. Di Kabupaten Sumba Timur, Yayasan Charis membentuk dan mendampingi beberapa PAUD di level desa. Guru-guru PAUD dampingan juga diberikan materi pelatihan awal di Charis National Academy dan mengadakan bengkel kerja secara rutin setiap bulannya di kota Waingapu. Selain itu, Yayasan Charis juga berinisiatif meningkatkan kapasitas dan

PAUD lain yang juga menerapkan program sejenis adalah TK Praioda dalam bentuk Kelompok Bermain Anak (KBK). KBK adalah suatu program yang didesain oleh ChildFund yang menysasar kepada orang tua dan diimplementasikan oleh mitra daerah seperti Yayasan SID dan Yayasan Adjarmanu di Sumba Timur. Dalam BKB, yang memberikan materi kepada orang tua adalah kader BKB yang mengampu di masing-masing kategori usia anak dan lebih sistematis dengan adanya BKB Kit

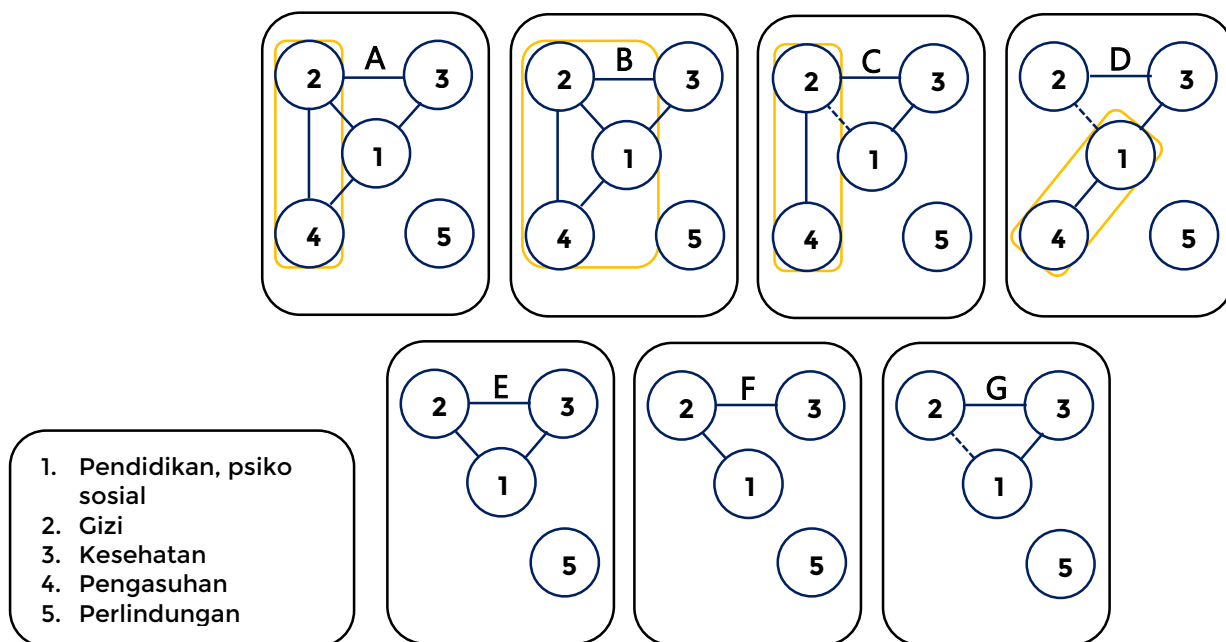
kualifikasi guru-guru PAUD untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi dengan mekanisme ikatan dinas di PAUD-PAUD dampingan di Sumba Timur apabila telah menyelesaikan studinya.

Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (**Himpaudi**) **belum terbentuk di Sumba Timur**, namun cabang Ikatan Guru Taman Kanak-kanak (IGTKI) sudah didirikan sejak tahun 2011. Peran IGTKI terhadap Pemkab Sumba Timur masih sebatas kerja sama teknis seperti menjadi nara sumber dan pelatih dalam kegiatan PAUD. IGTKI bersama dengan Pemkab dan Bunda PAUD kabupaten secara rutin juga menyelenggarakan perayaan Hari Anak Nasional (HAN) dan Pekan Olah raga dan Seni (Porseni) PAUD di tingkat kabupaten yang diikuti oleh guru dan peserta didik PAUD. Kegiatan yang diadakan berupa lomba kreativitas peserta didik dan kompetensi guru PAUD seperti mendongeng dan membuat APE sederhana yang kemudian dinilai oleh Bunda PAUD dan IGTKI.

3.6.7. PAUD Holistik Integratif (HI)

Konsep PAUD HI masih belum cukup dikenal oleh para pemangku kepentingan program anak usia dini di Kabupaten Sumba Timur. Walaupun konsep ini telah digaungkan sejak enam tahun lalu, hanya beberapa orang dari informan studi yang pernah mendengar terminologi PAUD HI. Di tingkat layanan, program anak usia dini di Sumba Timur memang sudah mulai dan secara tidak langsung mengintegrasikan layanan-layanan anak usia dini di level desa seperti PAUD dengan Posyandu, PAUD dengan BKB, BKB dengan Posyandu, hanya saja belum dalam koridor holistik dan integratif.

Grafik 3: Ragaman Bentuk Integrasi Layanan Anak Usia Dini di Desa



Seperti yang telah dipaparkan dalam bab-bab di atas, layanan-layanan anak usia dini di Sumba Timur telah berjalan di tingkat desa. Layanan-layanan ini mencakup layanan pendidikan dan pengembangan psiko-sosial dalam bentuk PAUD (Kober dan TK), layanan peningkatan gizi dalam bentuk program PMT baik di PAUD dan Posyandu, layanan pemantauan dan tindakan kesehatan

yang diadakan di Posyandu dan Puskesmas, layanan pengasuhan dan pendidikan keorangtuaan oleh BKB dan KBK. Dengan diterbitkannya **Perda Kabupaten Sumba Timur No. 4 tahun 2014** tentang ‘Perlindungan Anak’, dan pembentukan Lembaga diasumsikan setiap desa juga sudah mengembangkan mekanisme program perlindungan setidaknya dengan pembentukan Komite Perlindungan Anak Desa (KPADes). KPADes merupakan entitas yang dibentuk unsur-unsur desa untuk menjamin hak-hak anak yang merupakan perpanjangan tangan Lembaga Perlindungan Anak Daerah (LPAD) yang telah dibentuk melalui **SK Bupati Sumba Timur No. 219 tahun 2013**. Dalam perannya, KPADes mempunyai fungsi pencegahan terhadap tindak kekerasan kepada anak, fungsi pendampingan terhadap anak dengan resiko dan masalah, fungsi koordinasi dengan unsur-unsur di dalam dan luar desa dalam perlindungan ana, dan fungsi advokasi terhadap hak-hak anak seperti akta kelahiran.

Hasil penelusuran studi ini juga mengungkapkan setidaknya ada tujuh ragam bentuk keterpaduan pada layanan-layanan tersebut di Sumba Timur. Saat ini, **bentuk E adalah bentuk keterpaduan yang paling banyak ditemui di desa-desa** dimana layanan pendidikan dan psiko-sosial, gizi, dan pemantauan kesehatan anak telah tersedia di setiap desa. Layanan pengasuhan dan pendidikan keorangtuaan masih belum menyeluruh ke setiap desa dan masih terbatas pada desa-desa dampingan Yayasan SID, Yayasan Adjarmanu, dan DP3AP2KB yang telah mengembangkan bentuk keterpaduan B, termasuk di dalamnya TK Praioda dan PAUD Metanoia. Bentuk F umumnya ditemukan pada PAUD-PAUD yang belum memiliki izin pendirian dan operasional dari Disdik Sumba Timur yang menjadi halangan administrasi bagi Puskesmas memberikan layanan kesehatan ke PAUD. Sedangkan bentuk keterpaduan G terlihat pada PAUD-PAUD yang telah memiliki izin operasional namun tidak mempunyai hubungan langsung dengan Posyandu di lingkungan PAUD termasuk juga PAUD yang belum memberikan layanan PMT kepada peserta didiknya seperti PAUD Lentera Sumba.

4. Kesimpulan

1. Program Pengembangan Anak Usia Dini di Kabupaten Sumba Timur sudah sangat berkembang.
2. Dukungan kebijakan terkait pengembangan anak usia dini sebagian besar masih ditautkan dengan kebijakan-kebijakan di tingkat nasional. Meskipun sebagian besar amanat kebijakan-kebijakan ini sudah dijalankan oleh Pemkab Sumba Timur, percepatan program PAUD masih banyak terkendala dengan tidak adanya sinergi antara sektor-sektor dan OPD terkait.
3. PAUD diinisiasi oleh pemerintah, masyarakat, mitra pemerintah daerah, yayasan dan gereja, utamanya didirikan atas respon terhadap kondisi anak usia dini di dusun dan terbatasnya akses kepada layanan PAUD di desa.
4. Operasional PAUD berasal dari kumpulan dana bantuan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, dan iuran-iuran orang tua peserta didik yang kemudian dikelola dan digunakan untuk pembelian perlengkapan-peralatan PAUD, insentif guru, dan program PMT.
5. Masih banyak PAUD yang belum dapat mengakses dana-dana bantuan karena belum mempunyai izin operasional dan NPSN sebagai pra-syarat administrasi pengajuan bantuan, baik di tingkat desa, kabupaten, dan nasional.
6. Beberapa PAUD sudah mulai mengadopsi kurikulum PAUD 2013 namun penerapan di dalam pengajaran masih banyak menemui tantangan baik dari segi kelengkapan pendukung kurikulum dan juga kapasitas guru dalam menerapkan kurikulum 2013.
7. Kualifikasi guru PAUD di lokasi studi sebagian besar sudah sarjana walaupun dalam tataran kabupaten mayoritas guru PAUD masih berkualifikasi SMA dan setingkatnya, dan guru dengan kualifikasi sarjana lebih cepat dan kreatif dalam mengartikulasikan kegiatan pembelajaran dibanding guru berkualifikasi SMA.
8. Sebagian besar guru senior sudah pernah mendapatkan pelatihan materi PAUD dari pemerintah kabupaten, yayasan gereja, dan/atau dari lembaga mitra pemerintah daerah lainnya yang berwenang menyelenggarakan pelatihan.
9. APE baik dalam dan luar ruang masih banyak dibutuhkan PAUD secara kuantitas dan kualitas, pun demikian guru juga perlu dibekali pengetahuan dan keterampilan dalam memaksimalkan penggunaan APE yang tersedia untuk stimulasi perkembangan anak.
10. Aspek-aspek perkembangan peserta didik cukup baik dan memperlihatkan kurva normal sesuai dengan usia. Meski begitu, masih banyak anak yang tertinggal di satu atau lebih aspek perkembangannya, khususnya pada PAUD-PAUD yang berpusat pada guru dan lebih mendorong pendekatan skolastik dalam pembelajaran.
11. Orang tua juga masih banyak yang berharap dan menginginkan anaknya mendapat keterampilan skolastik di PAUD dan berdampak pada layanan yang juga mendorong pada pendekatan tersebut.
12. Di tingkat desa, layanan-layanan anak usia dini belum terpadu dan menyeluruh. Integrasi layanan baru dilakukan secara parsial antara beberapa layanan. Beberapa PAUD yang sudah memadukan layanan-layanan kesehatan, gizi, psiko-sosial dan pengasuhan umumnya dikelola oleh lembaga non-pemerintah seperti TK Praioda di Desa Mbatakapidu, Kota Waingapu yang diinisiasi dan dikelola oleh Yayasan SID dan PAUD Metanoia (BKB HI Harapan Sumba) di Kelurahan Temu, Kanatang yang dikelola oleh Gereja Bethel jemaat Temu.

Daftar Pustaka

1. Allen, Sarah & Kerry Daly. (2007). *The effects of father involvement: an updated research summary of the evidence*. Ontario, Canada: Father Involvement Research Alliance.
2. Analytical and Capacity Development Partnership (ACDP) Education Sector 040. (2016). *Strategies for improving basic education: school/madrasah effectiveness in Sumba, volume 1: comprehensive situational analysis*. Jakarta: ACDP.
3. Bappenas. (2008). *Strategi nasional pengembangan anak usia dini holistik integratif*. Jakarta: Bappenas.
4. BPS Sumba Timur. (2018). *Sumba Timur dalam Angka 2018*. Sumba Timur: BPS.
5. Chakrapani, Chuck. (2011). Statistical reasoning vs. magical thinking; shamanism as statistical knowledge: is a sample size of 30 all you need?. *Vue Magazine*. April 2011. 16-19
6. Chugani, H.T. (1994). Development of regional brain glucose metabolism in relation to behavior and plasticity, dalam Dawson G. & Fischer K.W. (editor). *Human Behavior and the Developing Brain*. Hal. 153-175. New York: Guilford Publications, Inc.
7. Gottman, J. & Joan Declaire. (1997). *The heart of parenting: raising an emotionally intelligent child*. New York: Simon & Schuster.
8. Hasan, Amer, dkk. (2013). *Early childhood education and development in poor villages in Indonesia: strong foundation, later success*. Washington, D.C.: The World Bank.
9. Nelson, Charles A. (2000). The neurobiological bases of early intervention dalam Jack P. Shonkoff & Deborah A. Phillips (ed.). *From neurons to neighborhoods: the science of early childhood development*. Washington, D.C.: National Academy Press.
10. Simasari, G.R. (2014). Studi deskriptif mengenai keterlibatan ayah dalam pemenuhan tugas perkembangan anak pada keluarga di tahap family with pre-school children. *Paper*. Bandung: Universitas Padjadjaran.
11. Susanto, M. D. (2013). Keterlibatan ayah dalam pengasuhan, kemampuan coping, dan resiliensi remaja. *Jurnal sains dan praktik psikologi*. I (2). 101-113.
12. Waingapu Online. (2019) Stunting di Sumba Timur Masih Tersebar Merata. *Waingapu Online*. Tersedia di: <https://www.waingapu.com/stunting-di-sumba-timur-masih-tersebar-merata/>
13. World Bank. (2005). *Early childhood education and development in Indonesia: An Investment for a better life*. Washington, D.C.: The World Bank

Lampiran

Peraturan Pemerintah tentang PAUD

No	Kebijakan	Tingkat	Tentang	Keterkaitan dengan PAUD
1	UU No. 35/2014	Nasional	Perlindungan anak	Perlindungan terhadap hak-hak anak
2	PP No.2/2018	Nasional	Standar pelayanan minimal (SPM)	Pemerintah kabupaten/kota wajib menyelenggarakan SPM Pendidikan dan Kesehatan anak usia dini; pasal 5 - 6
3	Perpres No. 60/2013	Nasional	PAUD HI	Kebijakan kunci PAUD HI di tingkat nasional
4	Perpres No. 42/2013	Nasional	Gerakan nasional percepatan perbaikan gizi	Upaya bersama pemerintah dan masyarakat untuk perbaikan gizi masyarakat di seribu hari pertama kehidupan
5	Perpres No. 83/2017	Nasional	Kebijakan strategis pangan dan gizi	Pijakan untuk Rencana aksi nasional dan daerah untuk Pangan dan Gizi termasuk untuk balita
6	Permendagri No. 19/2011	Nasional	Integrasi posyandu	Pengintegrasian layanan dasar di Posyandu-BKB-Pos PAUD
7	Permendagri No. 20/2018	Nasional	Pengelolaan keuangan desa	Desa wajib mengeluarkan belanja desa di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat termasuk di dalamnya layanan-layanan anak usia dini; Pasal 16 dan 17
8	Permendagri No. 22/2018	Nasional	Penyusunan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2019	RKPD diwajibkan sinergi dengan arah kebijakan nasional diantaranya percepatan penurunan stunting dan layanan anak usia dini
9	Permendikbud No. 84/2014	Nasional	Pendirian satuan PAUD	Jelas
10	UU No. 35/2014	Nasional	Standar nasional PAUD	Jelas
11	PP No.2/2018	Nasional	Kurikulum 2013 PAUD	Jelas
12	Perpres No. 60/2013	Propinsi	Penyediaan layanan PAUD	Jelas
13	Perpres No. 42/2013	Kabupaten	Petunjuk teknis penggunaan DAK-BOP PAUD 2019	Jelas

No	Kebijakan	Tingkat	Tentang	Keterkaitan dengan PAUD
14	Perpres No. 83/2017	Kabupaten	Upaya kesehatan anak	Jelas
15	Permendagri No. 19/2011	Kabupaten	Pemantauan pertumbuhan, perkembangan, dan gangguan tumbuh kembang anak	Jelas; Peran puskesmas dalam DDTK
16	Permendagri No. 20/2018	Kabupaten	Pusat Kesehatan Masyarakat	Puskesmas menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat termasuk anak usia dini; pasal 35-36
17	Permendagri No. 22/2018	Kabupaten	Taman Anak Sejahtera	Pendirian dan penyelenggaraan Taman Anak Sejahtera yang menyasar anak usia dini
18	Permendikbud No. 84/2014	Nasional	Penyelenggaraan pendidikan madrasah	Pendirian dan penyelenggaraan madrasah termasuk Raudhatul Athfal
19	UU No. 35/2014	Nasional	Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak	Pengembangan dan Penyelenggaraan Kabupaten/Kota yang mengakomodasi ha-hak anak
20	PP No.2/2018	Nasional	Pengelolaan BKB HI	Jelas
21	Perpres No. 60/2013	Nasional	Revolusi Kesehatan Ibu dan Anak di Provinsi NTT	Jaminan perlindungan dan layanan bagi ibu dan balita
22	Perpres No. 42/2013	Nasional	Revolusi Kesehatan Ibu dan Anak	Turunan dari Pergub NTT No. 42 tahun 2009
23	Perpres No. 83/2017	Nasional	Perlindungan anak	Turunan dari UU No. 35 tahun 2014, Jaminan perlindungan hak dan layanan bagi anak
24	Permendagri No. 19/2011	Nasional	Pencegahan dan penanganan stunting	Turunan dari Perpres No. 83 tahun 2017
25	Permendagri No. 20/2018	Nasional	Pembentukan Tim Lembaga Perlindungan Anak Daerah (LPAD)	Cikal bakal dari Perbup Sumba Timur No.4 tahun 2014; Gugus tugas pelaksana perlindungan hak-hak anak Sumba Timur
26	Permendagri No. 22/2018	Nasional	Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pencegahan dan	Turunan dari Perbup Sumba Timur No.1 tahun 2019; Gugus tugas pelaksana pencegahan

No	Kebijakan	Tingkat	Tentang	Keterkaitan dengan PAUD
			Penanggulangan Gizi Buruk dan Stunting	gizi buruk dan stunting pada anak Sumba Timur

A photograph of three young children standing in a classroom, holding up their drawings. The child on the left is wearing a white t-shirt with a cartoon bear and a yellow paper craft. The child in the middle is wearing a black t-shirt and holding a white paper with several small drawings. The child on the right is wearing a white t-shirt with blue text and holding a white paper with a drawing. The background shows a classroom with a window and other children.

William and Lily Foundation

www.wlf.or.id

Contact: support@wlf.or.id